

Referensi Terpercaya Sektor Komunikasi & Informatika

KOMINFO next

Penertiban Frekuensi Radio

Edisi 42
Juni 2022



Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Angkatan Laut (Narasi pendek gitu niatnya soal iniiii wkkwkw isinya bisa 3-4 baris)

TIM REDAKSI

Pengarah:
Mira Tayyiba

Wakil Pengarah:
JH Phillip Gobang

Pemimpin Redaksi:
Rhina Anita

Wakil Pemimpin Redaksi:
Daoni Diani Hutabarat

Redaktur Pelaksana:
Helmi Fajar Andrianto

**Wakil Redaktur
Pelaksana:**
Viskayanesya

Redaktur:
M. Taufiq Hidayat
Verawati
Annisa Bonita P.

Reporter:
Yusuf
Ahmad Irso Kubangun
Meita Pusparini
Desideramus Bitan
Emild Kadju

Fotografer:
Agus Yudi Harsono
Doni Paulus Sumule
Sri Indrati Novinarsari
Indra Kusuma

Desain & Layout:
Adista Winda Rizka
Rahma Aulia Indroputri
Lamdza Rachmattunisa
Dhenty Febrina Sahara
Annas Yudistira Saputra

Produksi:
Fahmie Trihatin J.

Alamat Redaksi:
Biro Humas Kementerian
Komunikasi dan Informatika
Jl. Medan Merdeka Barat
No. 9, Jakarta Pusat

Kominfo Tertibkan Frekuensi TNI Jaga Kejayaan Laut Kita

Salam TRANSFORMASI, Pembaca Majalah Kominfo Next sekalian. Kita sering mendengar semboyan yang identik dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut, yaitu *Jalesveva Jayamahe* yang artinya "justru di laut kita jaya" atau "kejayaan kita ada di laut".

Tahukah kita, doktrin TNI AL lewat slogan itu bahkan sering disampaikan Presiden Joko Widodo dalam berbagai pidato kenegaraan, salah satunya pada saat pidato Kepala Negara tahun 2014 yang menegaskan Indonesia sebagai negara maritim. Oleh karena

itu, dalam rangka menindaklanjuti pesan penting Presiden Jokowi untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan memperkuat kejayaan Indonesia di bidang maritim, kolaborasi dan sinergi lintas sektor sangatlah dibutuhkan.

Dalam hal kejayaan laut dan memperkuat kedaulatan maritim, Kementerian Komunikasi dan Informatika turut mengambil peran sentral yang berkaitan dengan spektrum frekuensi radio. Melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI), Kementerian Kominfo bertugas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio, termasuk yang berhubungan dengan sektor maritim nasional.

Atas dasar dan tujuan menjaga wilayah teritorial Indonesia sektor maritim, Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo menjalin kerja sama dengan TNI AL melalui Operasi Penertiban

Rhina Anita

• Kepala Biro Hubungan Masyarakat
• **Pemimpin Redaksi Majalah Kominfo Next**



Spektrum Frekuensi Radio Serentak Tahun 2022. Momentum itu menjadi penting, mengingat kolaborasi dan sinergi ini memberikan dampak yang positif kepada masyarakat agar tertib menggunakan spektrum frekuensi radio dan perangkat yang tersertifikasi. Kepada TNI AL, Dirjen SDPPI Kominfo mengatakan komitmen tersebut sejalan dengan tema yang diusung, yaitu TRANSFORMASI.

Pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio yang terus dilakukan oleh Ditjen SDPPI Kominfo semakin diperkuat dengan adanya kerja sama TNI AL tersebut. Untuk itu, para petugas lapangan yang menjadi garda terdepan dalam menjaga spektrum frekuensi radio perlu mengedepankan koordinasi yang masif dengan TNI AL, termasuk Balai Monitoring (Balmon) di seluruh wilayah Indonesia.

Para pembaca yang berbahagia, edisi Majalah Kominfo Next kali ini mempersembahkan secara khusus tentang pengawasan spektrum frekuensi radio, khususnya di sektor maritim. Berbagai kebijakan, capaian, langkah-langkah dan target ke depannya dari kerja sama antara Kementerian Kominfo dan TNI AL telah diulas dengan lengkap pada edisi ini.

Kami sampaikan selamat membaca! Dengan diiringi semangat Kementerian Kominfo yang terus melakukan pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio, mari kita wujudkan TRANSFORMASI bersama Kominfo dan jaga kejayaan laut kita bersama TNI AL.

Selamat membaca!

... para petugas lapangan yang menjadi garda terdepan dalam menjaga spektrum frekuensi radio perlu mengedepankan koordinasi yang masif dengan TNI AL, termasuk Balai Monitoring (Balmon) di seluruh wilayah Indonesia.

Hukum Zipf

Pagi-pagi, masih fresh, enaknya baca majalah KominfoNext nih. Apa lagi kalo ada artikel tentang hukum Zipf. Apa itu hukum Zipf? Siapa sih Zipf ini sampe bikin hukum sendiri?

Hukum Zipf adalah salah satu bagian dari bibliometrik, sebuah bidang ilmu pengetahuan yang berhubungan erat dengan ilmu informasi. Bibliometrik merupakan penggunaan metode statistik untuk menganalisis buku, artikel dan publikasi lainnya, terutama yang berkaitan dengan konten ilmiah. Bibliometrik juga berkaitan erat dengan bidang ilmu perpustakaan dan informasi.

Istilah ini pertama kali digunakan oleh Paul Otlet pada tahun 1934¹, yang kemudian dipopulerkan dalam Bahasa Inggris oleh Alan Pritchard tahun 1969 dalam tulisannya yang berjudul “*Statistical Bibliography or Bibliometrics?*”

Awalnya bibliometrik dikembangkan untuk melihat seberapa besar dampak dari sebuah penelitian atau tulisan ilmiah dengan menggunakan analisis sitasi atau kutipan². Peneliti dapat melihat seberapa sering hasil penelitiannya dirujuk oleh penulis atau peneliti lain. Bahkan ketika akan melakukan penelitian atau penulisan karya ilmiah, penulis atau peneliti juga bisa mengetahui seberapa bagus suatu sumber informasi dilihat dari sitasi yang digunakan. Kalau yang dirujuk suatu penelitian yang sumber informasinya tidak bagus, tentu penelitiannya juga akan berdampak kurang bagus. Bukan hanya di situ lho, ilmuwan informasi juga memakai analisis sitasi untuk menilai suatu jurnal utama secara kuantitatif, mengetahui hubungan timbal balik antara penulis dari lembaga dan aliran pemikiran yang berbeda, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan bibliometrik, jadi bisa kelihatan secara kuantitatif, kualitas penelitian dan kualitas sumber informasinya.

Hukum Zipf

Nah, hukum Zipf adalah salah satu dari banyak hukum yang biasa dipelajari dalam bibliometrik. Hukum ini dinamai berdasarkan seorang ahli bahasa dan filolog yang mempelajari kejadian statistik dalam berbagai bahasa yang namanya George Kingsley Zipf. Zipf menemukan bahwa dalam suatu karya tulis ternyata hanya ada beberapa kata yang sangat sering digunakan, tapi sebagian besar jarang digunakan.

Contohnya, seluruh kata dalam satu tulisan ilmiah, maka kata dengan jumlah kedua terbanyak hanya akan ada setengahnya dari kata yang paling banyak digunakan. Jumlah kata terbanyak ketiga pun hanya digunakan setengah dari kata terbanyak kedua tersebut, begitu seterusnya.

Masih bingung? Misalnya gini nih, kalo kata ‘dan’ digunakan sebanyak 40.000 kali, berarti kata keduanya diduga hanya digunakan setengahnya, atau sekitar 20.000 kali. Begitu seterusnya. Nah, Zipf merumuskan bahwa jika ‘r’ adalah peringkat sebuah kata dan ‘f’ adalah frekuensinya, maka secara matematis hukum zipf dapat dinyatakan sebagai:

$$r \times f = c$$

c adalah konstanta

¹ Otlet, Paul (1934). *Traité de Documentation: Le Livre sur le Livre. Théorie et Pratique*. Bruxelles: Editions Mundaneum.

² “Bibliometrics and Citation Analysis: Home”. *Research Guides*. University of Wisconsin-Madison Libraries. Dikunjungi 7 Juli 2020.

Zipf mengilustrasikan hukumnya pada novel *Ulysses* karya James Joyce. Dia menunjukkan bahwa kata kesepuluh yang paling sering muncul berjumlah 2.653 kali, kata keseratus yang paling sering muncul 265 kali, kata ke-dua ratus muncul 133 kali, dan seterusnya. Maka, peringkat kata jika dikalikan dengan frekuensi kata sama dengan konstan, yaitu mendekati 26.500.

Nah, terus fungsinya apa menghitung kata dan mengurutkan ini?

Perhitungan ini bisa digunakan dalam pengindeksan otomatis, misalnya menentukan istilah yang relevan terhadap suatu dokumen dari hasil perhitungan tadi. Hingga tahap tertentu, istilah yang relevan dalam dokumen dapat secara otomatis diambil dari hasil perhitungan tersebut. Istilah yang paling sering muncul dan paling jarang muncul dalam dokumen tidak mungkin digunakan sebagai istilah yang digunakan.

Keuntungannya, kalau dirumuskan dengan baik dan dengan algoritma yang tepat, akan langsung terlihat suatu tulisan itu tentang apa, bahkan tanpa harus membaca seluruh isinya. Sehingga kalau diakses lewat mesin pencari, hasil pencarian tentang istilah yang tepat akan menempatkan dokumen atau tulisan yang sesuai di peringkat paling atas tanpa harus membaca seluruh isi dokumen tersebut.

Hukum Zipf juga pernah diteliti untuk digunakan dalam mengekstraksi fragmen pada dokumen paralel³. Dokumen paralel adalah dokumen berpasangan yang salah satunya adalah terjemahan dari dokumen lainnya. Berdasarkan penelitian Mehdi Mohammadi tersebut, pendekatan itu mencapai hasil yang menjanjikan dalam hal presisi dan temu kembali dokumen paralel. Metode yang diusulkan independen dan tidak bergantung pada pengetahuan linguistik apapun.

Nah, mungkin ada yang tahu tentang Voynich Manuscript nih, sebuah codex abad 15 yang sampai sekarang belum tau itu bahasa apa, apakah tulisannya memiliki arti atau hanya hoaks. Nah, dokumen ini ternyata juga taat pada hukum Zipf, yang artinya kemungkinan besar dokumen ini bukan hoaks, tapi sebuah dokumen yang ditulis menggunakan bahasa yang tidak diketahui atau sandi yang belum terpecahkan.



³ Mohammadi, Mehdi (2016). "Parallel Document Identification using Zipf's Law" (PDF). *Proceedings of the Ninth Workshop on Building and Using Comparable Corpora. LREC 2016. Portorož, Slovenia. pp. 21–25. Archived (PDF) from the original on 2018-03-23. (https://comparable.limsi.fr/bucc2016/pdf/BUCC04.pdf)*

Presiden Jokowi Optimistis Pembangunan IKN Berjalan Lancar

Optimisme Presiden berdasarkan pengalaman pemerintah membangun sejumlah infrastruktur, antara lain Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo yang memiliki cukup banyak tantangan.



Presiden Joko Widodo optimistis bahwa pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan lini masa yang telah direncanakan. Optimisme Presiden berdasarkan pengalaman pemerintah membangun sejumlah infrastruktur, antara lain Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo yang memiliki cukup banyak tantangan.

“Bandara di Kulon Progo sebesar itu saja (selesai) 18 bulan, satu setengah tahun. Padahal tantangannya banyak. Interiornya sulit, kemudian ceiling-nya juga tinggi banget, itu bisa diselesaikan,” ujar Presiden saat meninjau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Rabu, 22 Juni 2022.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menambah optimisme tersebut dan mengatakan bahwa pembangunan di KIPP bisa dimulai Agustus 2022.

“Di sini Agustus kita sudah mulai, Pak, siap,” tegas Menteri PUPR.

Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H. Sumadilaga dalam keterangan terpisah menyampaikan bahwa di titik Presiden meninjau nantinya akan dibangun Istana Kepresidenan. Ia juga menjelaskan kepada Presiden Jokowi bahwa saat ini pihaknya akan segera memulai pelaksanaan pembangunan kawasan IKN secara bertahap, terutama dalam rentang waktu 2022-2024.

Di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan kami akan membangun *land development* beberapa kawasan untuk pengembangan Istana, untuk pengembangan kantor-kantor dan sebagainya, didukung oleh air bersih, sanitasi, drainase, dan lain-lain,” ungkapnya.

“Kemudian di luar kawasan IKN, kami akan memulai pembangunan jalan tol ke arah IKN. Itu pada intinya. Inshaallah mulai bulan Agustus pembangunan IKN akan dimulai,” lanjutnya.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut yaitu Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahilil Lahadalia, Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono, dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor. (BPMI Setpres)



<https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-optimistis-pembangunan-ikn-berjalan-lancar/>

“

Kemudian di luar kawasan IKN, kami akan memulai pembangunan jalan tol ke arah IKN. Itu pada intinya. Inshaallah mulai bulan Agustus pembangunan IKN akan dimulai,

”

Kasus COVID-19 Kembali Naik, Presiden: **Tetap Waspada**

Presiden terus mendorong masyarakat untuk segera mendapatkan suntikan ketiga vaksin COVID-19 atau booster sebagai salah satu langkah antisipasi.



Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan terkait kasus harian COVID-19 di Tanah Air yang kembali meningkat dalam beberapa hari terakhir. Meskipun *positivity rate* Indonesia masih di bawah standar yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Presiden menegaskan bahwa pemerintah dan masyarakat harus tetap waspada menghadapi pandemi COVID-19.

“Sejak awal meskipun belum naik, dulu kan saya sudah ngomong, enggak sekali, dua kali, tiga kali, waspada, waspada, waspada, baik oleh yang Omicron maupun yang BA.4, BA.5,” tegas Presiden dalam keterangannya usai menghadiri acara Silaturahmi dengan Alumni Penerima Kartu Prakerja di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, pada Jumat, 17 Juni 2022

Presiden pun berharap tidak ada kenaikan kasus COVID-19 dalam kurun waktu ke depan. Untuk itu, Presiden terus mendorong masyarakat untuk segera mendapatkan suntikan ketiga vaksin COVID-19 atau *booster* sebagai salah satu langkah antisipasi.

“Kita berharap tidak ada kenaikan, tapi saya kira antisipasi kita sudah saya sampaikan juga sebulan, dua bulan yang lalu *booster* semuanya *booster*,” ucap Presiden.



Presiden juga menjelaskan bahwa pemerintah telah menyediakan vaksin COVID-19 dalam jumlah yang banyak sehingga masyarakat bisa segera mendapatkan suntikan ketiga vaksin COVID-19 atau *booster*.

“Vaksinnya ada, masih ada puluhan juta. Itu segera, minta semuanya. Sekarang ini kita ingin melakukan *booster* mencari pesertanya itu yang kesulitan,” tandasnya

(BPMI Setpres)

<https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/kasus-COVID-19-kembali-naik-presiden-tetap-waspada/>

“

Sejak awal meskipun belum naik, dulu kan saya sudah ngomong, enggak sekali, dua kali, tiga kali, waspada, waspada, waspada, baik oleh yang Omicron maupun yang BA.4, BA.5,

”

Presiden Jokowi: Indonesia Siap Menjembatani Komunikasi Rusia-Ukraina

Presiden menegaskan bahwa penyelesaian damai penting untuk terus dikedepankan dan juga ruang-ruang dialog terus dibuka.



Konstitusi Indonesia mengamanatkan agar Indonesia selalu berusaha berkontribusi bagi terciptanya perdamaian dunia. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Kamis, 30 Juni 2022.

“Isu perdamaian dan kemanusiaan selalu menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia. Dalam konteks inilah, saya lakukan kunjungan ke Kyiv dan Moskow,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan keterangan pers bersama dengan Presiden Putin.

Presiden Jokowi menambahkan, meskipun situasi saat ini masih sangat sulit, namun Presiden menegaskan bahwa penyelesaian damai penting untuk terus dikedepankan dan juga ruang-ruang dialog terus dibuka.

“Saya telah sampaikan pesan Presiden Zelensky untuk Presiden Putin dan saya sampaikan kesiapan saya untuk menjadi jembatan komunikasi antara dua pemimpin tersebut,” ucap Presiden Jokowi.

(BPMI Setpres)

<https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-indonesia-siap-menjembatani-komunikasi-rusia-ukraina/>



Presiden Jokowi: Kunjungan ke Ukraina Wujud Kepedulian Indonesia untuk Ukraina

Dengan kemampuan yang ada, rakyat dan pemerintah Indonesia berusaha memberikan kontribusi bantuan termasuk obat-obatan dan komitmen rekonstruksi rumah sakit di sekitar Kyiv.



Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, di Istana Mariyinsky, Kyiv, Ukraina, pada Rabu, 29 Juni 2022. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa kunjungannya ke Ukraina merupakan perwujudan kepedulian masyarakat Indonesia untuk Ukraina.

“Saya sampaikan ke Presiden Zelensky bahwa kunjungan ini saya lakukan sebagai manifestasi kepedulian Indonesia terhadap situasi di Ukraina,” ujar Presiden Jokowi saat menyampaikan pernyataan pers bersama Presiden Zelensky selepas pertemuan.

Presiden Jokowi menegaskan posisi Indonesia mengenai pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Meskipun masih sangat sulit dicapai, Presiden Jokowi juga tetap menyampaikan pentingnya penyelesaian damai dan mengatakan bahwa spirit perdamaian tidak boleh pernah luntur.

“Dalam kaitan ini, saya menawarkan diri untuk membawa pesan dari Presiden Zelensky untuk Presiden Putin yang akan saya kunjungi segera,” imbuhnya.

Selanjutnya, Presiden Jokowi juga menyampaikan kepeduliannya terhadap dampak perang bagi kemanusiaan. Dengan kemampuan yang ada, rakyat dan pemerintah Indonesia berusaha memberikan kontribusi bantuan termasuk obat-obatan dan komitmen rekonstruksi rumah sakit di sekitar Kyiv.

Di samping itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan pentingnya Ukraina bagi rantai pasok pangan dunia. Menurutnya, semua usaha harus dilakukan agar Ukraina bisa kembali melakukan ekspor bahan pangan.

“Penting bagi semua pihak untuk memberikan jaminan keamanan bagi kelancaran ekspor pangan Ukraina, termasuk melalui pelabuhan laut. Saya mendukung upaya PBB dalam hal ini,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi kembali menyampaikan undangan secara langsung kepada Presiden Zelensky untuk berpartisipasi

dalam KTT G20 yang akan diselenggarakan bulan November tahun ini di Bali. Presiden Jokowi juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus memperkokoh kerja sama bilateral dengan Ukraina.

“Tahun ini adalah 30 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Ukraina. Saya menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat kerja sama yang lebih baik,” tandasnya.

Sementara itu, Presiden Zelensky menyampaikan apresiasinya atas kehadiran Presiden Joko Widodo ke Ukraina. Menurutnya, ini adalah kunjungan pemimpin negara Asia pertama ke Ukraina sejak invasi melanda Ukraina.

“Terima kasih atas kehadiran Presiden Jokowi yang merupakan kunjungan pertama pemimpin Asia sejak invasi melanda Ukraina. Saya juga mengundang kalangan usaha Indonesia untuk berpartisipasi dalam rekonstruksi Ukraina pascaperang,” ungkap Presiden Zelensky.

(BPMI Setpres)

<https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-kunjungan-ke-ukraina-wujud-kepedulian-indonesia-untuk-ukraina/>



PMK pada Hewan, Presiden: Segera berikan Vaksin

Pemerintah telah mendatangkan 800 ribu vaksin untuk segera disuntikkan kepada hewan ternak di seluruh Indonesia.



Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah akan bertindak cepat untuk mengatasi masalah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang sejumlah hewan ternak di Tanah Air. Salah satunya, pemerintah telah mendatangkan 800 ribu vaksin untuk segera disuntikkan kepada hewan ternak di seluruh Indonesia.

"Suntikkan cepat-cepat, cepat, sehingga bisa melindungi sapi-sapi yang lain," ujar Presiden dalam keterangannya usai menghadiri acara Silaturahmi dengan Alumni Penerima Kartu Prakerja di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, pada Jumat, 17 Juni 2022.

Presiden juga menjelaskan bahwa penyakit mulut dan kuku ini dikonfirmasi dapat menyebar dengan cepat. Menurut Presiden, pemerintah telah melakukan upaya lockdown di beberapa daerah di Tanah Air namun belum memberikan hasil yang maksimal.

"Padahal sudah diblok oleh Kementan dan Kepolisian tapi nyatanya bergerak cepat dan sekarang sudah 18 provinsi, 190 kabupaten dan kota," ungkap Presiden.

(BPMI Setpres)



<https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/pmk-pada-hewan-presiden-segera-berikan-vaksin/>







Transformasi, Kolaborasi Kominfo-TNI AL Tertibkan Frekuensi Radio Maritim

Dokumentasi Liputan Utama : Humas SDPPI

Tahun 2022 merupakan pertama kalinya Operasi Penertiban Spektrum Frekuensi Radio serentak dilakukan secara nasional. Bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI melaksanakan operasi dan apel bersama sebagai bentuk implementasi kerja sama untuk mengatasi permasalahan penggunaan spektrum frekuensi radio di Indonesia.

Apel Bersama Operasi Penertiban Spektrum Frekuensi Radio Serentak Secara Nasional Tahun 2022 merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerja sama antara SDPPI dan TNI AL dalam beberapa hal strategis, yang salah satunya mengatur pengawasan pengendalian spektrum frekuensi radio di tengah laut.

Kegiatan operasi penertiban spektrum frekuensi radio serentak tersebut dilaksanakan mulai tanggal 27 Juni 2022 s.d. 1 Juli 2022 di 34 wilayah provinsi Indonesia, dengan pelaksana Unit Pelaksana Teknis Balai Monitor dan Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Mengusung semangat "TRANSFORMASI", Dirjen SDPPI Ismail berharap kolaborasi itu akan memberikan dampak yang positif kepada masyarakat agar tertib menggunakan spektrum frekuensi radio dan perangkat yang tersertifikasi. Meski tugas pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio sangat berat dilakukan, namun demikian, pelaksanaan tugas tersebut lebih diutamakan untuk pembinaan.



"Operasi penertiban serentak ini diutamakan ke arah pembinaan, namun dalam hal pengguna frekuensi melakukan pelanggaran berulang dapat diproses sesuai peraturan perundang-undangan," jelas Dirjen SDPPI membuka apel bersama yang digelar di Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Banda Aceh-593, di Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (21/06/2022)..

Dirjen SDPPI Kementerian Kominfo berharap petugas lapangan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai peraturan perundang-undangan dan memberikan kontribusi yang maksimal kepada organisasi. "Saya berpesan kepada petugas lapangan tetap mengedepankan kesabaran dalam melaksanakan operasi penertiban serta menghindari perbuatan yang arogan dan perilaku yang tidak terpuji dalam melaksanakan tugas, misalnya menghindari perilaku KKN dengan pihak terkait."

Petugas lapangan juga didorong untuk dapat secara intensif melakukan koordinasi dengan pihak terkait, khususnya pihak TNI AL untuk meningkatkan komunikasi yang harmonis. Hal ini diperlukan untuk memperlancar kegiatan operasi penertiban serentak pada dinas maritim.

Pada 31 Mei 2022 lalu, Kementerian Kominfo bersama TNI-AL telah menyepakati perjanjian kerja sama mengenai Sinergisitas Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pengawasan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, dan Kegiatan Peperangan Elektronika.

Melalui perjanjian kerja sama itu, Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo dan TNI AL melaksanakan sinergi dan kolaborasi dalam mengatasi permasalahan penggunaan spektrum frekuensi radio yang digunakan oleh masyarakat maritim.

Menurut Dirjen Ismail, hampir setiap tahun negara Indonesia mendapatkan laporan pengaduan dari International Telecommunication Union (ITU) mengenai gangguan spektrum frekuensi radio yang merugikan (*harmful interference*) pada frekuensi dinas penerbangan.

Gangguan spektrum frekuensi radio yang merugikan pada dinas penerbangan tersebut sangat membahayakan keselamatan jiwa manusia. Hasil identifikasi menunjukkan, penyebab gangguan tersebut dikarenakan adanya penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak berizin dan tidak sesuai dengan peruntukannya.

Pada umumnya gangguan berasal dari radio komunikasi masyarakat maritim seperti nelayan tradisional, sehingga sulit terjangkau untuk dilakukan penindakan lapangan berupa penghentian penggunaan SFR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dirjen SDPPI Kementerian Kominfo mengharapkan kerja sama antara Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo dan TNI-AL menjadi salah satu solusi



dalam pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan frekuensi pada dinas maritim, yang diharapkan dapat berdampak pada turunnya jumlah laporan pengaduan spektrum frekuensi radio pada dinas penerbangan oleh masyarakat internasional.

Bahkan, tidak hanya dalam pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio yang menjadi prioritas, Dirjen Ismail mengharapkan kerja sama kedua pihak juga berlanjut dalam pengembangan sumber daya manusia dan pertukaran data dan informasi. Menurutnya pelibatan personil dalam peningkatan SDM antara kedua belah pihak harus segera terwujud melalui kegiatan-kegiatan pelatihan monitoring bersama antara Ditjen SDPPI dan TNI AL.



“Adanya pelatihan bersama tersebut diharapkan dapat saling bertukar informasi mengenai pola pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio dari kedua belah pihak,” ungkapnya.

Dirjen SDPPI Kementerian Kominfo mengakui ada perbedaan dalam pola pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio baik Ditjen SDPPI dan TNI-AL. Namun, menurutnya hal itu akan memperkuat pola pengawasan di Indonesia.

Ditjen SDPPI umumnya melakukan pengawasan spektrum frekuensi radio secara administratif berupa izin (ISR) dan teknis. “Sementara pengawasan TNI AL digunakan untuk keperluan militer atau untuk kegiatan intelijen dll. Perbedaan inilah yang diharapkan menjadi titik temu untuk saling bertukar informasi mengenai pola pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio,” ungkap Dirjen Ismail.

Pengawal SFR Indonesia Kumpulkan PNBP Rp20 T Setahun



Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan program kerja terus melakukan upaya tata kelola anggaran yang lebih efektif, prudent, dan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Termasuk pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terus membaik dari tahun ke tahun.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika RI Johnny G. Plate, Realisasi PNBP Kementerian Kominfo dari Tahun Anggaran (TA) 2018 hingga Tahun Anggaran 2022 menunjukkan tren yang membaik dan terus meningkat, yang disebabkan oleh ekstensifikasi seperti lelang spektrum frekuensi dan intensifikasi PNBP.

Sebagai pengawal spektrum frekuensi radio di Indonesia, Kementerian Kominfo memberikan kontribusi PNBP sekitar Rp20 Triliun setahun. Bahkan diperkirakan target PNBP TA 2022 meningkat sebesar Rp24,755 Triliun berpotensi mengalami kenaikan dari lelang spektrum frekuensi yang baru di tahun 2022.

Selain lelang frekuensi, sumber dan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kominfo dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 juga bersumber dari BHP frekuensi, PNBP USO, BHP Telekomunikasi, Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi, IPP penyiaran, dan PNBP lainnya.



Spektrum frekuensi merupakan sumber daya alam yang terbatas yang luar biasa nilainya. Sebagai gambaran, kami menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak setidaknya 20 triliun dalam setahun dari penghasilan spektrum frekuensi radio, dan trennya terus meningkat, sekitar Rp20 triliun dalam setahun

jelas Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Kominfo Ismail dalam Apel Bersama Ditjen SDPPI Kominfo dan TNI AL dalam rangka Sinergisitas Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Peperangan Elektronika, di Kolinlamil Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (21/06/2022).



Dirjen SDPPI Kementerian Kominfo menjelaskan, besaran PNBPN tersebut bukan merupakan tujuan bagi Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo. Tetapi lebih kepada bagaimana memberikan gambaran bahwa nilai dari spektrum frekuensi sangat besar. Apalagi menurutnya sebagian besar sistem komunikasi di Indonesia bertumpu pada komunikasi seluler.

Mayoritas sistem komunikasi di Indonesia saat ini bertumpu pada *cellular communication*, *mobile broadband*, lebih dari 90%. Selebihnya menggunakan fixed broadband atau kabel optik yang dipasang ke rumah-rumah. Dari gambaran tersebut, jantung dari sistem komunikasi *mobile communication* adalah spektrum frekuensi. Sebab, tidak mungkin sistem mobile communication dapat berjalan dengan baik dan dapat dinikmati oleh masyarakat jika spektrum frekuensi radio tidak tersedia dan bersih dari gangguan.

Fungsi Ditjen SDPPI adalah melakukan proses manajemen keseluruhan sejak awal yaitu perencanaan spektrum frekuensi radio. Menurut Dirjen Ismail, pengelolaan ini harus direncanakan karena spektrum frekuensi ibarat kue lapis yang tidak bisa tercampur antar lapisan-lapisan. Sistem seluler harus bekerja di frekuensi seluler saja, demikian halnya dengan sistem komunikasi radio maritim yang juga hanya bekerja di spektrum frekuensi radio maritim.

“Kalau dipakai dicampur, maka terjadi interferensi dan tidak dapat digunakan dengan baik,” ujar Dirjen Ismail.

Begitu pula halnya dengan radio FM, Radio AM, televisi, penerbangan, radar, cuaca dan sebagainya. Banyak sekali lapisan-lapisan spektrum frekuensi radio yang penggunaannya harus tertib di masing-masing lapisan. Sekali saja sistem tersebut tercampur penggunaannya, maka tidak akan bisa digunakan dengan baik.

“Oleh karena itu, spektrum frekuensi radio ini harus direncanakan dan bukan satu negara yang merencanakan, tapi perencanaannya terpadu secara internasional melalui forum atau lembaga dunia yang kita sebut International Telecommunication Union (ITU),” jelas Dirjen Ismail.

ITU merupakan lembaga yang merencanakan spektrum secara global. Namun setiap negara memiliki ruang untuk memberikan preferensi, footnote atau memberikan catatan terkait dengan national interest. Dirjen Ismail menegaskan, banyak hal yang telah diperjuangkan oleh Pemerintah Indonesia di ITU untuk memasukkan domain-domain National Interest.



“Misalnya persoalan satelit, kita ini negara kepulauan, tidak mungkin kita bisa menyelesaikan sistem komunikasi di Indonesia hanya menggunakan kabel optik, *impossible*. Ada 17.000 pulau dengan penduduk yang tersebar demikian luas, banyak skater tersebar-sebar seperti itu, maka sistem komunikasi satelit adalah sistem yang sangat penting buat Indonesia. Jadi, harus ada komplementeri antara terrestrial communication dengan satelit communication,” papar Dirjen SDPPI Kementerian Kominfo.

Terdapat banyak catatan terkait nasional interest yang diperjuangkan di ITU untuk menjadi hak negara Indonesia untuk masuk di dalam ITU Radio Regulation pada aspek perencanaan, termasuk koordinasi internasional.

“Kita bolak-balik kami melakukan koordinasi untuk komunikasi satelit dan sebagainya ke pihak-pihak yang berkepentingan, baik dengan negara-negara tetangga. Kita punya forum setiap tiga bulanan dengan Singapura, Malaysia, Brunei. Karena apa? Karena yang namanya sistem frekuensi radio ini *borderless*, tidak bisa kita batasi. Begitu Batam memberikan siaran atau pemancaran yang di luar aturan, pasti Singapura akan terganggu, sebaliknya juga demikian. Jadi kita harus selalu melakukan koordinasi untuk membuat sistem spektrum frekuensi radio ini berjalan dengan baik,” tandasnya.

Saat menghadiri Apel Bersama Ditjen SDPPI dan TNI AL yang berlokasi di atas KRI Banda Aceh 593, Dirjen SDPPI Kementerian Kominfo terpukau dengan kapal perang milik TNI AU tersebut.

“Suasana hari ini membuat suatu hal yang istimewa bagi kami semua diundang di tempat ini, di dalam kapal KRI Banda Aceh 593 untuk melaksanakan sebuah pertemuan dan apel seperti ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kami semua. Semoga sinergi ini menghasilkan banyak terobosan-terobosan dan efisiensi yang bisa kita jalankan secara bersama-sama,” ungkapnya.

Kadiskomlekal Joko Edi Supriyanto menyatakan apel bersama merupakan Perjanjian Kerjasama (PKS) yang telah ditandatangani 31 Mei 2022 lalu. “Sebagai kelanjutan dan implementasi PKS tersebut TNI AL berusaha meningkatkan kemampuan Peperangan Elektronik (Pernika) yang hingga saat ini masih sangat terbatas,” tuturnya.

Menurut Joko Edi Supriyanto, dari sisi peralatan dan kemampuan SDPPI mampu diandalkan untuk berperan serta dalam memberikan informasi dan expertise bagi kepentingan pertahanan negara terutama bidang peperangan elektronik. “Ketika pada masa damai diarahkan sebagai kegiatan pengumpulan informasi penggunaan spektrum frekuensi radio oleh bakal lawan,” tuturnya.

Operasi Penertiban Spektrum Frekuensi Radio Serentak Secara Nasional Tahun 2022 merupakan kolaborasi Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo dan TNI AL agar tertib menggunakan spektrum frekuensi radio dan perangkat yang tersertifikasi. Adapun tema yang diambil TRANSFORMASI



atau tertib gunakan spektrum frekuensi radio dan perangkat tersertifikasi. Operasi penertiban serentak ini diutamakan ke arah pembinaan, namun dalam hal pengguna frekuensi melakukan pelanggaran berulang dapat diproses sesuai peraturan perundang-undangan.





Gandeng TNI-AL, Tingkatkan Sinergi Dukungan Data dan Informasi



**Karena kami sama-sama
memiliki perangkat teknis
yang membutuhkan *skills* dan
kompetensi**



Kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dalam meningkatkan sinergisitas tak hanya dilakukan dari sisi pengawasan pengendalian spektrum frekuensi radio maritim. Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Ismail menyatakan kedua pihak juga melakukan pengembangan SDM bersama dan saling memberikan dukungan terkait data dan informasi.

Hal ini sesuai dengan perjanjian kerja sama yang sudah ditandatangani, yang mengatur beberapa hal di antaranya proses pengawasan pengendalian spektrum frekuensi radio khususnya di wilayah perairan, serta kerja sama pengembangan sumber daya manusia.

“Karena kami sama-sama memiliki perangkat teknis yang membutuhkan *skills* dan kompetensi,” ujarnya usai melakukan apel bersama di KRI Banda Aceh 593 di Kolinlamil Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (21/06/2022).

Kerja sama dengan TNI AL ini merupakan momentum yang baik untuk saling mendukung ketersediaan data dan informasi, mengingat kerja sama tersebut juga sebagai penguat jaringan Kepala Balai Monitoring (Balmon) di seluruh Indonesia.



Berangkat dari ide yang sangat sederhana bahwasanya kita di era digital seperti ini adalah peperangan elektronika penggunaan spektrum elektromagnetik, spektrum gelombang radio menjadi sangat penting dan strategis



“Data dan informasi yang akan disiapkan oleh SDPPI untuk mensupport data-data yang berkaitan dengan kegiatan, kita istilahkan perang elektronik. Tetapi intinya ini adalah sebuah upaya untuk melakukan pencegahan dan pemantauan berbagai macam kapal-kapal dan pengguna-pengguna spektrum frekuensi radio di laut,” jelas Dirjen Ismail.

Kondisi spektrum frekuensi radio penerbangan turut disorot. Menurutnya sejauh ini pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo masih terkendali dengan memiliki alat-alat dan proses yang rutin untuk melakukan pengawasan. Namun tetap perlu dilakukan antisipasi, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi penerbangan sangat sensitif dan juga menyangkut masalah keselamatan jiwa manusia.

Upaya pencegahan tersebut sangat penting mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan.

“Ini penting sekali karena negara kita mayoritas kan laut, daratan kita hanya sepertiga barangkali, dua pertiga negara kita laut dan ini adalah bagian integral dari NKRI. Tentu harus pro aktif melakukan upaya-upaya pencegahan dan edukasi, sehingga penggunaan perangkat-perangkat komunikasi para nelayan kita mereka tertib menggunakannya



di frekuensi yang sudah kami sediakan. Sehingga kedaulatan digital itu tidak hanya dijaga di darat, tapi kedaulatan digital pun harus kita jaga di tengah laut,” jelas Dirjen Ismail.

Untuk itu sistem pencegahan terhadap komunikasi penerbangan dilakukan bersama dengan TNI AL, terutama di tengah laut. “Karena kami sudah kehabisan akal, ibaratnya kalau di tengah laut yang terpantau dan tercatat di data alat kami tapi untuk reminding personalnya kami sulit sekali. Kami sangat terbantu dengan kerja sama dengan TNI AL untuk memberikan peringatan dan memberitahu kejadian-kejadian tengah laut itu bisa onsite dilakukan oleh teman-teman TNI AL,” jelasnya.

Kadiskomlekal Laksamana Pertama TNI Joko Edi Supriyanto menyatakan, dilakukannya perjanjian kerja sama dengan Ditjen SDPPI. TNI AL menilai sinergi dengan pemerintah melalui Kementerian Kominfo untuk menjaga kedaulatan laut menjadi penting.

“Berangkat dari ide yang sangat sederhana bahwasanya kita di era digital seperti ini adalah peperangan elektronika penggunaan spektrum elektromagnetik, spektrum gelombang radio menjadi sangat penting dan strategis,” ujarnya.

Dengan adanya sumber daya yang dimiliki baik oleh Kementerian Kominfo dan TNI AL, Kadiskomlekal Laksamana Pertama TNI menilai disamping ada keterbatasan. Perlu diakui di lingkungan laut perlu dilakukan sinergi dengan Kementerian Kominfo yang memiliki sumber daya yang cukup besar dan luas.

“Oleh karena itu, kita mensinergikan dan memanfaatkan dengan yang ada dengan perangkat di daerah, yaitu dengan Balmon yang tersebar di seluruh Indonesia. Nanti kita bisa minta disampaikan di depan Pak Dirjen apa yang jadi recruitment kita dan yang menjadi recruitment Kominfo menjadi sangat luar biasa kedepannya,” imbuhnya.

Dalam kegiatan apel bersama Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo dan TNI AL, hadir Direktur Pengendalian Ditjen SDPPI Sabirin, serta Kepala UPT Balai Monitoring di seluruh Indonesia.







Pertemuan Bilateral Menkominfo Sepanjang Juni 2022

1 Kunjungan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menerima Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia H.E. Vincent Piket di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (07/06/2022).





Menkominfo didampingi Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Samuel Abrijani Pangerapan dan Staf Khusus Menteri Kominfo Bidang Kebijakan Digital dan SDM, Dedy Permadi.



Dalam pertemuan itu, Menteri Johnny membahas kerja di sektor infrastruktur digital, skema pembiayaan untuk investasi Indonesia, dan General Data Protection Regulation (GDPR).



Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate (kanan) memberikan cinderamata kepada Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia H.E. Vincent Piket (kiri), usai membahas potensi kerja sama di sektor infrastruktur digital, di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (07/06/2022).

Pertemuan Bilateral Menkominfo Sepanjang Juni 2022

2 Kunjungan Menteri Korea Selatan

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dan Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Republik Korea Lee Sang Min mengadakan pertemuan membahas mengenai peluang kemitraan kedua negara di bidang pengembangan dan pembiayaan pusat data.



Menteri Johnny bertukar pengalaman untuk mendiskusikan pengembangan dan rencana pembiayaan pusat data yang merupakan salah satu program untuk mendukung terwujudnya percepatan transformasi digital yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.



Dalam pertemuan itu Menkominfo Johnny G. Plate didampingi Sekjen Kementerian Kominfo, Mira Tayyiba; Staf Khusus Bidang Kebijakan Digital dan Pengembangan SDM, Dedy Permadi; Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Ditjen Aptika, Bambang Dwi Anggono, serta Kepala Pusat Kelembagaan Internasional, Ichwan Makmur Nasution.



Sementara Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Republik Korea Lee Sang Min dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Indonesia Taesung Park, didampingi Direktur Divisi Kerjasama Pemerintah Digital, Biro Pemerintah Digital Dalam Negeri dan Keamanan Republik Korea, Sungjoo Soon; Co-Direktur DGCC Indonesia-Korea, Kim Hyoo-joong; Direktur Negara Korea Eximbank, Kim Jae-cheol; serta penerjemah Bahasa Indonesia untuk Pemerintah Republik Korea, Min Seon-hee.



Pertemuan Bilateral Menkominfo Sepanjang Juni 2022

3 Kunjungan Duta Besar Bulgaria untuk Indonesia

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menerima kunjungan Duta Besar Bulgaria untuk Republik Indonesia HE. Mr. Petar Andonov di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (27/06/2022)





Dalam pertemuan itu, Menteri Johnny didampingi Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Ismail dan Stafus Bidang Kebijakan Digitalisasi dan Pengembangan SDM, Dedy Permadi. Sementara Dubes Bulgaria didampingi Deputy Head of Mission Dr. Stoimen Velev.

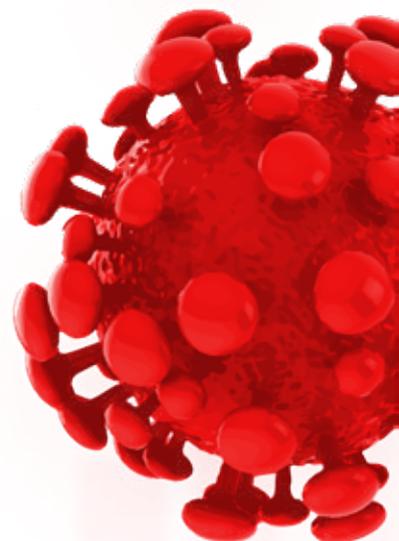


"Pagi ini saya dikunjungi Duta Besar Bulgaria untuk Indonesia H.E. Petar Andonov untuk mendiskusikan potensi kerja sama kedua negara di sektor digital. Termasuk secara khusus membahas soal penanganan di bidang keamanan informasi untuk mencegah serangan siber agar penegak hukum di Indonesia dan Bulgaria bisa menanginya secara serius," jelasnya di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (27/06/2022).



Kasus COVID-19 Kembali Naik, Presiden: Tetap Waspada

Sumber : <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/dirjen-who-apresiasi-kepemimpinan-indonesia-di-g20-dan-penanganan-COVID-19/>



Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan terkait kasus harian COVID-19 di Tanah Air yang kembali meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Meskipun *positivity rate* Indonesia masih di bawah standar yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Presiden menegaskan bahwa pemerintah dan masyarakat harus tetap waspada menghadapi pandemi COVID-19.

“Sejak awal meskipun belum naik, dulu kan saya sudah *ngomong*, enggak sekali, dua kali, tiga kali, waspada, waspada, waspada, baik oleh yang Omicron maupun yang BA.4, BA.5,” tegas Presiden di Sentul, Bogor, Jumat (17/06/2022)

Presiden pun berharap tidak ada kenaikan kasus COVID-19 dalam kurun waktu ke depan. Untuk itu, Presiden terus mendorong masyarakat untuk segera mendapatkan suntikan ketiga vaksin COVID-19 atau *booster* sebagai salah satu langkah antisipasi.

“Kita berharap tidak ada kenaikan, tapi saya kira antisipasi kita sudah saya sampaikan juga sebulan, dua bulan yang lalu *booster* semuanya *booster*,” ucap Presiden.

Presiden juga menjelaskan bahwa pemerintah telah menyediakan vaksin COVID-19 dalam jumlah yang banyak sehingga masyarakat bisa segera mendapatkan suntikan ketiga vaksin COVID-19 atau *booster*.

“Vaksinnya ada, masih ada puluhan juta. Itu segera, minta semuanya. Sekarang ini kita ingin melakukan *booster* mencari pesertanya itu yang kesulitan,” tandasnya.

Apresiasi WHO

Di sisi lain, penanganan COVID-19 di Indonesia mendapat apresiasi dari Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dalam kunjungannya ke Indonesia, Dirjen WHO menyampaikan apresiasi terhadap capaian Indonesia dalam mengatasi pandemi COVID-19 di Tanah Air.

Menurutnya Indonesia merupakan salah satu negara dengan pencapaian terbaik di bidang vaksinasi dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia.

“Dirjen WHO berbicara mengenai masalah vaksinasi dan beliau menyatakan bahwa Indonesia adalah salah satu dari *best achievement*—kalau dipertandingkan dengan rata-rata *achievement*—yang dicapai oleh negara-negara di dunia,” ungkap Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, yang hadir mendampingi Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/06/2022).

Selain itu, Dirjen WHO turut menilai sistem kesehatan utama dan asuransi kesehatan wajib di Indonesia telah berjalan dengan baik. WHO pun menyatakan masih terus melakukan pengawasan terhadap pandemi COVID-19 meski kasus COVID-19 di dunia sudah mulai stabil.

“Tadi disampaikan juga oleh Dirjen bahwa walaupun situasi kasus COVID-19 di dunia sudah mendatar, namun beliau menyatakan bahwa pandemi belum selesai dan kita masih memantau terus, WHO masih memantau terus munculnya varian-varian baru,” ungkap Menteri Retno.

Sektor Pariwisata Pacu Pemulihan Ekonomi

Dalam kesempatan berbeda, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, Prof. Wiku Adisasmito, menyampaikan kabar baik perkembangan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia dari sektor perekonomian nasional dan pariwisata. Kedua sektor ini tumbuh di tengah masa transisi yang semakin terkendali dan diikuti kebijakan yang adaptif untuk peningkatan ekonomi nasional.

Pertama, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Ekonomi Indonesia pada Kuartal 1 Tahun 2022 terjadi perbaikan dengan pertumbuhan 5,01 persen. Angka ini meningkat dibandingkan saat awal pandemi tahun 2020 dengan angka hanya sebesar 2,97 persen secara tahunan (year on year).

“Peningkatan ekonomi nasional harus terus ditingkatkan dalam upaya untuk bangkit dari Pandemi. Saya mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada dalam meningkatkan aktivitasnya untuk mendukung proses pemulihan ekonomi nasional,” Wiku dalam Keterangan Pers Perkembangan Penanganan COVID-19 secara virtual, yang disiarkan YouTube kanal resmi Sekretariat Presiden, Kamis (02/06/2022).

Kabar baik yang kedua, Pemerintah terus berupaya meningkatkan kerjasama luar negeri dalam upaya pemulihan ekonomi. Salah satunya melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf). Penanganan pandemi COVID-19 yang semakin tertangani dengan baik serta kondisi keamanan yang stabil, maka sektor parekraf semakin siap untuk menerima kembali wisatawan internasional.

Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama Satgas Penanganan COVID-19 melakukan pertemuan dengan Pemerintah Singapura pada 1 Juni 2022 di Singapura. Kedua belah pihak membahas kebijakan pariwisata, pelonggaran pembatasan perjalanan, serta optimalisasi destinasi wisata Batam, Bintan, dan Bali.

Sehingga Indonesia bersama Singapura dan negara-negara ASEAN lainnya, dapat membuat Asia Tenggara sebagai destinasi wisata yang atraktif. Langkah yang digagas ini akan bertujuan membantu pemulihan ekonomi dan membuka lapangan kerja yang lebih luas.

“Momentum ini harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk akselerasi di semua sektor, terkhusus transportasi udara, untuk bisa bersaing dan mendukung aktivasi sektor pariwisata nasional dan internasional,” pungkask Wiku.



Survei Menunjukkan

Publik Makin Paham TV Digital



Pemerintah mendorong semua pihak untuk mendukung migrasi TV analog ke digital, atau *analog switch off (ASO)*, untuk terlaksana secara nasional pada November 2022. Dukungan tersebut tidak hanya dari lembaga penyiaran publik/swasta tapi juga masyarakat serta kalangan industri penyiaran, seperti periklanan dan rumah produksi.

Salah satu hal yang menggembirakan adalah pengetahuan masyarakat tentang ASO dalam dua tahun terakhir terus meningkat. Hasil survei Multi Utama Risetindo dan Litbang Kompas menunjukkan, pengetahuan masyarakat mengenai siaran TV digital menjelang penghentian siaran analog semakin meningkat.

Menurut Direktur PT Multi Utama Risetindo Murdan Alfa Satyawan, pihaknya telah melakukan tiga kali survei yakni pada Juni-Juli 2021, Oktober 2021, dan Maret 2022. "Temuan pertama yang bisa kita sampaikan adalah terjadi peningkatan pengetahuan mengenai siaran TV digital yang sedang kita perkenalkan, yaitu siaran TV digital yang tidak berbayar," kata Murdan dalam webinar "Survei Kesiapan Masyarakat dalam Mendukung Era Baru Siaran TV Digital" di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/7/2022).

Lebih lanjut Murdan memaparkan, pada survei pertama, pengetahuan masyarakat masih rendah yakni 22,02 persen. Angka tersebut naik menjadi 46,1 persen pada Oktober 2021 dan menjadi 51,94 persen pada Maret 2022. Namun demikian, lanjut Murdan, peningkatan pengetahuan tentang siaran TV digital tersebut tidak diikuti oleh peningkatan pengetahuan tentang kapan pemerintah akan menghentikan siaran TV analog.

Dari responden survei Juni-Juli 2021 yang mengaku tahu tentang siaran TV digital, hanya 13,66 persen yang mengetahui jadwal ASO. Sedangkan pada survei Oktober 2021 ada 27,55 persen dan survei Maret 2022 hanya 25,31 persen.

Di satu sisi, minat masyarakat untuk beralih ke siaran TV digital tidak berbayar meningkat. Pada survei Juni-Juli 2021, masyarakat yang tertarik beralih ke TV digital sebanyak 62,74 persen, sedangkan pada Oktober 2021 sebanyak 63,51 persen, dan pada Maret 2022 sebanyak 72,26 persen.

Sementara itu, Peneliti Utama Litbang Kompas BE. Satrio mengatakan, pihaknya melakukan dua kali survei, yakni pada 2020 yang bekerja sama dengan Kementerian Kominfo dan pada 2021 yang merupakan survei secara independen. Dia memaparkan, pada 2020, sebanyak 80 persen atau 79,8 persen masyarakat masih menggunakan TV dengan antena biasa. Kemudian, 76 persen

mengatakan tidak tahu atau belum tahu bahwa siaran TV analog akan berubah menjadi siaran TV digital. Gambaran ini membutuhkan sosialisasi yang lebih gencar lagi kepada publik.

Sedangkan pada survei 2021, Satrio mengatakan, pengetahuan masyarakat tentang siaran TV digital bervariasi berdasarkan daerahnya. Masyarakat di Sumatera, Jawa, Sulawesi, memiliki tingkat pengetahuan yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain, dengan masing-masing skor 65,5 persen, 49,6 persen, dan 70,2 persen.

Berdasarkan hasil survei tersebut, Murdan memberikan rekomendasi kepada lembaga penyiaran atau penyelenggara multipleksing untuk memperbanyak tayangan sosialisasi khususnya terkait berhentinya siaran analog pada waktu yang sudah ditentukan pemerintah, yakni 2 November 2022.



Disarankan juga agar para produsen STB atau asosiasi penyedia STB untuk melakukan juga sosialisasi sampai ke tingkat toko untuk mengajak masyarakat beralih ke TV digital dan kelebihan-kelebihan lainnya.

Menurut Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, dalam menyukseskan ASO, pemerintah saat ini tidak hanya fokus dengan penyaluran perangkat set top box (STB) bagi 6,7 juta rumah tangga miskin, namun juga sosialisasi untuk 22 juta rumah tangga mampu.

“Jumlah masyarakat mampu yang terkena dampak ASO jumlahnya 22 juta rumah tangga, dan perlu didorong menyiapkan perangkat secara mandiri. Masyarakat ini memiliki TV analog tetapi belum ada rencana mengganti TV baru, sehingga perlu memasang STB,” ujar Dirjen Usman.

Dirjen IKP menjelaskan, proses migrasi siaran TV digital hingga ke titik pelaksanaan ASO tahap pertama (April-Agustus 2022) tidak dilakukan dalam waktu singkat. Proses ini bahkan sudah berlangsung selama 10 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia, dan Singapura telah mendahului Indonesia dalam menerapkan ASO lebih awal.

“Banyak biaya dan hal dilakukan, baik pemerintah dan swasta, untuk mempersiapkan ASO, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga ekosistem TV Digital,” tutur Usman Kansong.

Persiapan itu juga termasuk pasokan perangkat STB yang bisa dibeli rumah tangga mampu yang belum memiliki TV digital di toko elektronik di berbagai daerah, baik secara langsung dan *online*. “Saat ini ada 36 merek STB yang telah disertifikasi Kementerian Kominfo dengan berbagai model dan harga yang sudah tersedia di toko elektronik,” katanya.

Kementerian Kominfo memastikan, masyarakat yang belum memiliki TV digital dan belum memasang STB, tetap akan bisa mengakses siaran TV digital melalui berbagai sarana, yakni TV parabola *free to air*, TV berlangganan, hingga akses konten media melalui layanan internet.



Sukseskan ASO Lewat Empat Langkah

Pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak telah menyiapkan dukungan untuk mendukung keberhasilan ASO. Menurut Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen IKP Kemenkominfo) Usman Kansong, setidaknya ada empat hal yang akan terus dilakukan Kementerian Kominfo bersama pihak terkait lainnya untuk menyukseskan program ASO.



Pertama, dukungan infrastruktur berupa penyediaan multipleksing di siaran digital, yang mampu menampung setiap siaran televisi yang bermigrasi ke digital dan menjangkau minimal 70 persen populasi dengan siaran TV digital.

Hal kedua, dukungan migrasi siaran TV analog ke digital, di mana Lembaga Penyiaran Publik (LPP) maupun Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) harus mengalihkan program siarannya ke multipleksing siaran digital.

“Jangan sampai ketika masyarakat siap bermigrasi, program siaran belum ada. Itu sudah dipastikan disiapkan oleh Lembaga Penyiaran Publik TVRI dan Lembaga Penyiaran Swasta,” kata Dirjen IKP Kominfo di Kota Jambi, Senin (27/6/2022).

Ketiga, dukungan penyediaan perangkat set top box atau STB agar mudah diperoleh di berbagai daerah dengan harga terjangkau, yang sekarang berkisar antara Rp150.000–Rp200.000. Sedangkan, masyarakat yang termasuk dalam kategori rumah tangga miskin sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, akan diberikan secara gratis atau cuma-cuma. Bagi kalangan masyarakat yang mampu dipersilakan membeli STB secara mandiri.

Keempat adalah dukungan sosialisasi dan edukasi, agar masyarakat memahami manfaat TV digital kemudian secara sukarela bermigrasi ke sana. Sosialisasi dan edukasi secara terus menerus yang dilakukan Kementerian Kominfo, Komisi DPR, LPS, TVRI, dan pemerintah daerah membuat sebagian besar masyarakat di Indonesia mulai paham peralihan dari TV analog ke TV digital.

“Yang kami edukasi antara lain misalnya peralihan kita sudah terlambat. Kita di ASEAN saja terlambat apalagi di level dunia. Negara-negara ASEAN telah bersepakat untuk menyelesaikan migrasi dari siaran TV analog ke siaran TV digital pada 2020 lalu,” jelas Dirjen Usman.

Hasil survei internal Kementerian Kominfo mengungkapkan lebih dari 60 persen masyarakat siap untuk beralih dari TV analog ke TV digital. Dirjen Usman Kansong bahkan optimistis kesiapan masyarakat saat ini bisa lebih di atas 70 persen.



Banyak biaya dan hal dilakukan, baik pemerintah dan swasta, untuk mempersiapkan ASO, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga ekosistem TV Digital



“Mungkin sekarang kalau kita (Kementerian Kominfo) melakukan survei lagi, angkanya sudah meningkat. Perkiraan kami antara 70 sampai 80 persen. Artinya masyarakat sudah siap beralih ke teknologi televisi digital,” ujar Dirjen IKP Kominfo.



Dorong Percepat Distribusi STB ke Keluarga Miskin

Sementara itu pendistribusian set top box (STB), alat penerima siaran digital untuk televisi (TV) analog, untuk keluarga miskin masih terus dilakukan oleh pemerintah, melalui Kominfo dan multipleksing yang terdiri dari Lembaga Penyiaran Pemerintah (LPP) TVRI dan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS).

Direktur Penyiaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kominfo Geryantika Kurnia pada awal Juni lalu mengatakan, sejak program penghentian siaran analog atau *analog switch off* (ASO) tahap I dilakukan 30 April lalu, Kominfo telah merealisasikan hampir 80 persen distribusi STB, sedangkan LPS masih di bawah lima persen.

“Jadi karena yang paling banyak dari bantuan pemerintah distribusinya kami dengan Komisi I DPR RI mendorong agar secepatnya mendistribusikan data untuk keluarga miskin,” ujar Direktur Penyiaran Kominfo, Minggu (5/6/2022).

Lebih lanjut Geryantika menjelaskan, berdasarkan data realisasi distribusi STB, hingga 5 Juni 2022 (data dashboard Kominfo), SCTV dan Indosiar baru mendistribusikan 32.648 dari komitmen 1.213.750 STB, MetroTV baru mendistribusikan 4.608 dari komitmen 704.378 STB, RCTI dan Global TV baru mendistribusikan 5.548 dari komitmen 1.143.121 STB, TransTV dan Trans 7 baru mendistribusikan 8.666 dari komitmen 616.511 STB.

Selanjutnya RTV baru mendistribusikan 3.962 dari komitmen 500.000, TV One dan ANTV baru mendistribusikan 5850 dari komitmen 149.587 STB, Nusantara TV mendistribusikan 2.934 dari komitmen 3.000 STB dan Kementerian Kominfo mendistribusikan 69.531 dari komitmen penyediaan tahap I sebanyak 87.310 STB.

Dengan data ini, hanya Nusantara TV yang hampir menyelesaikan komitmen distribusi STB ke keluarga miskin, namun secara keseluruhan, realisasi distribusi STB tahap I paling banyak oleh pemerintah.

“Nusantara TV 3000 sudah hampir selesai dan Kominfo komitmen satu juta (STB), sudah disampaikan 69 ribu (untuk tahap I), jadi yang paling banyak pemerintah,” imbuhnya.

Menurut Gerry, Menteri Kominfo Johnny G Plate juga sudah berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Kepala Daerah, baik Gubernur, Walikota dan Bupati di seluruh Indonesia untuk mempercepat distribusi STB dari LPS dan pemerintah.

Berdasarkan kondisi di lapangan, pendistribusian STB untuk keluarga miskin menemui kendala kriteria masyarakat penerima yang belum jelas.

Padahal, pemerintah sudah melaporkan ke komisi I DPR RI kriteria penerima bantuan STB, yakni rumah tangga miskin yang terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), sehari-hari menerima siaran TV analog, lokasi rumahnya bisa menerima siaran TV analog dan sudah menerima siaran TV digital, bersedia menerima bantuan STB, dan dalam satu rumah tangga itu nanti hanya satu STB.

“Misalkan di daerah terpencil, mereka menggunakan parabola atau internet itu bukan kriteria penerima STB yang gratis. Lalu jangan sampai bantuan STB yang didapat dijual kembali karena tidak memiliki TV,” katanya.

Lebih lanjut Gerry mengatakan, Kominfo juga ingin berkolaborasi dengan Pemda agar ikut melakukan sosialisasi ASO seperti yang sekarang dilakukan dan juga membantu distribusi STB. Tujuannya supaya masyarakat di seluruh daerah mengerti siaran TV digital dan mempersiapkan perangkat TV jika belum ada.

“Untuk mempercepat distributor STB, sesuai masukan dan Komisi I DPR RI, perlu kolaborasi dengan Pemda karena pemda ini yang mengerti benar-benar di lapangan. Kepala dinas dan PKH (Program Keluarga Harapan) setempat ini akan mempercepat distribusi STB dari swasta yang masih di bawah lima persen,” tandasnya.

Sumber: kominfo.go.id, infopublik.id



Anggaran Belanja Tambahan

Dyah Purwaningrum

Analisis Anggaran Ahli Madya
Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kemkominfo

Jika sebagai individu kita disarankan untuk punya pos anggaran *emergency fund* (dana darurat) yang disisihkan secara khusus untuk kebutuhan mendadak yang tidak direncanakan, negara pun punya pos cadangan anggaran yang terdapat di Bendahara Umum Negara (BUN). Pos cadangan anggaran negara ini kewenangannya dipegang oleh Menteri Keuangan dan dikelola oleh Bagian Anggaran BUN (BA BUN).

BA BUN memiliki kode 999 yang menguasai dan mengelola alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang jumlahnya sangat signifikan terkait Pengelolaan Utang, Pengelolaan Hibah, Investasi Pemerintah, Penerusan Pinjaman, Transfer ke Daerah & Dana Desa, Belanja Subsidi, Belanja Lainnya, dan Transaksi Khusus. Pos cadangan dimaksud dikategorikan sebagai Cadangan Keperluan Mendesak (CKM) atau non (di luar pos) CKM.

Terdapat kemungkinan munculnya kebutuhan anggaran untuk kegiatan atau program kerja mendesak yang—ternyata—belum dialokasikan pada tahun anggaran berjalan.

Jika demikian, apa yang bisa Kementerian/Lembaga (K/L) lakukan di saat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sudah terbit? Satu kata kunci yang sering diserukan oleh Kementerian Keuangan adalah optimalisasi. Maksudnya, K/L diminta untuk mengupayakan anggaran yang belum tersedia dari kantong sendiri, atau realokasi–menggeser anggaran dari program/kegiatan lain–guna memenuhi kebutuhan baru tersebut. Lantas, adakah alternatif lain jika diyakini bahwa optimalisasi tidak dapat dilakukan?

Opsi yang dapat juga ditempuh adalah pengajuan usul Anggaran Belanja Tambahan (ABT) melalui surat yang ditandatangani Menteri K/L ditujukan kepada Menteri Keuangan. Definisi ABT adalah anggaran belanja yang (dapat) disediakan oleh negara, melalui Bendahara Umum Negara (BUN) Kementerian Keuangan, untuk mendukung program pada tahun anggaran berjalan, akan tetapi belum termasuk dalam program dan anggaran K/L yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN.

ABT seyogiannya tersedia untuk mengakomodir pembiayaan kegiatan-kegiatan prioritas yang timbul akibat perubahan kebijakan atau adanya ketidakpastian masa depan, sehingga diperlukan perubahan program kerja dan kebutuhan penambahan alokasi anggaran.

Selanjutnya, usul ABT yang hendak dimasukkan pada kategori di luar pos CKM pun hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang apabila tidak dilaksanakan akan memberikan dampak pada cadangan risiko fiskal, stabilisasi harga pangan dan ketahanan pangan, beras pemerintah dan cadangan lainnya, juga kegiatan terkait penyesuaian anggaran pendidikan dan kesehatan, serta intervensi atas penanggulangan COVID-19, *social safety net*, dan dukungan industri.

Perlu diketahui bahwa agar ABT dapat diproses dengan lancar, efektif, efisien, dan tepat waktu, maka usul ABT wajib merujuk pada beberapa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) utamanya PMK Nomor 127/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08).

Dalam Pasal 7 ayat (1) diatur bahwa penggunaan anggaran BA 999.08 jenis belanja lain-lain pos

Satu kata kunci yang sering diserukan oleh Kementerian Keuangan adalah optimalisasi. Maksudnya, K/L diminta untuk mengupayakan anggaran yang belum tersedia dari kantong sendiri, atau realokasi–menggeser anggaran dari program/kegiatan lain–guna memenuhi kebutuhan baru tersebut.

CKM hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- memiliki dasar hukum paling rendah ditetapkan oleh Presiden atau berupa direktif Presiden yang tercantum dalam risalah sidang kabinet/rapat terbatas kabinet yang diterbitkan oleh Sekretariat Kabinet, atau pernyataan menteri/pimpinan lembaga pengusul bahwa kegiatan tersebut merupakan arahan Presiden yang disampaikan secara langsung kepada menteri/pimpinan lembaga berkenaan;

- kegiatan yang diusulkan tidak direncanakan dalam proses penyusunan anggaran K/L berkenaan;
- dana untuk kegiatan yang diusulkan tidak cukup tersedia dalam DIPA K/L berkenaan dan tidak memungkinkan untuk dilakukan realokasi antar program maupun kegiatan;
- kegiatan yang diusulkan tidak bersifat rutin; dan
- dari sisi waktu atas pelaksanaan kegiatan yang diusulkan, tidak memungkinkan untuk diajukan dalam APBN Perubahan.

Sehingga, ketika K/L hendak mengajukan usul ABT, unsur-unsur pada poin-poin tersebut di atas haruslah terpenuhi. Yang harus disiapkan K/L saat hendak mengajukan usul ABT adalah mampu menyediakan informasi tegas bahwa usul kegiatan memiliki dasar hukum paling rendah ditetapkan oleh Presiden atau berupa direktif Presiden yang tercantum dalam risalah sidang kabinet/rapat terbatas kabinet yang diterbitkan oleh Sekretariat Kabinet, atau pernyataan menteri/pimpinan lembaga pengusul bahwa kegiatan tersebut merupakan arahan Presiden yang disampaikan secara langsung kepada menteri/pimpinan lembaga berkenaan.



Misal, Kemenkominfo diminta dukungan komunikasi dan teknologi informasi untuk penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, padahal anggaran untuk kebutuhan kegiatan tersebut belum masuk dalam perencanaan penganggaran tahun sebelumnya, maka ABT dapat diusulkan dengan merujuk pada Keppres Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022.

Usul ABT yang disampaikan melalui surat Menteri juga perlu menyertakan dokumen-dokumen berikut:

- Kerangka Acuan Kerja (ToR) dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditandatangani oleh Eselon I pengusul;
- Laporan Hasil Reviu APIP K/L yang bersifat final;
- Dokumen pendukung lain yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan (dasar hukum, pricelist/surat penawaran yang sah);
- Surat Pernyataan telah dilakukan penelitian kelengkapan dokumen pendukungnya yang ditandatangani oleh Eselon I; serta

Yang harus disiapkan K/L saat hendak mengajukan usul ABT adalah mampu menyediakan informasi tegas bahwa usul kegiatan memiliki dasar hukum paling rendah ditetapkan oleh Presiden atau berupa direktif Presiden...

- Surat Pernyataan optimalisasi (*cost sharing*) yang juga ditandatangani oleh Eselon I pengusul. Yang dimaksud (hasil) optimalisasi adalah hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan suatu kegiatan yang target sasaran tercapai dan/atau sisa dana dari penandatanganan kontrak suatu kegiatan. Intinya, K/L ikut berkontribusi dan telah mengupayakan ketersediaan sebagian kebutuhan dana dengan melakukan optimalisasi di dalam lingkungan K/L.

Ketika surat usul ABT tidak dilengkapi dengan seluruh dokumen pendukung tersebut, dipastikan usulan tidak dapat diproses lanjut oleh Kementerian Keuangan. Saat penelaahan bersama antara K/L pengusul dengan Kementerian Keuangan, kelengkapan dokumen pendukung usul ABT wajib terhimpun.

Jadi, saat terjadi keadaan darurat, di mana ABT menjadi *last resort* –jalan terakhir yang harus diambil– maka K/L harus memastikan bahwa data dukung usul ABT lengkap sebelum diajukan ke Kementerian Keuangan. Jika sudah lengkap dan berdasar (hukum) yang cukup kuat, jangan juga terlalu berharap ABT akan diberikan sebesar nilai usulan bahkan dikabulkan, semua akan tergantung oleh status (fiskal) keuangan negara.

Akan jauh lebih baik, setiap program kerja direncanakan dan dianggarkan jauh pada tahun-tahun sebelumnya dengan mengantisipasi kemungkinan kegiatan tambahan di luar perencanaan.



Profil Singkat

Nama:
Dyah Purwaningrum

Jabatan:
Analis Anggaran Ahli Madya
Biro Perencanaan, Sekretariat
Jenderal Kemkominfo





Indonesia Peringkat 3 Global Skills Report 2022, Menteri Johnny: Kabar Baik di Bidang Talenta Digital

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyampaikan kabar baik mengenai prestasi Indonesia di bidang digital. Menurut Menteri Johnny, prestasi Coursera sebagai platform edukasi digital terbesar dalam *Global Skills Report* 2022, menempatkan Indonesia di urutan ketiga terbaik di dunia.

"Menurut laporan Coursera tahun 2022, Indonesia menempati peringkat ketiga *Global Skills Report* 2022 dari 102 negara pengguna Coursera. Peringkat pertama diduduki Swiss dan peringkat kedua diduduki Denmark. Ini berita baik bidang talenta digital terkait dengan *Global Skills Report* tahun 2022 yang dipublikasikan oleh Coursera," jelasnya dalam Konferensi Pers Indonesia Duduki Peringkat 3 Dunia dalam Coursera Global Skills Report 2022, di Media Center Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (27/06/2022).

Menkominfo menyatakan Coursera merupakan sebuah platform edukasi digital atau *massive open online course* (MOOC) terbesar di dunia, memiliki jumlah pengguna lebih dari 100 juta di seluruh dunia dan bekerja sama dengan lebih dari 3.000 universitas dan 250 mitra industri.

"Coursera menyediakan layanan pembelajaran daring (dalam jaringan) yang mencakup tiga topik antara lain bidang bisnis, bidang teknologi digital, dan bidang *data science*," jelasnya.

Dalam laporan tahunan tersebut, Coursera mengukur keterampilan para peserta didik berdasarkan pencapaian di masing-masing negara dan menghasilkan peringkat global.

“

Secara spesifik, Indonesia menempati peringkat teratas untuk bidang keterampilan teknologi dan data science, peringkat Indonesia naik 39 level dari periode sebelumnya,”

-Menteri Johnny.

“Secara spesifik, Indonesia menempati peringkat teratas untuk bidang keterampilan teknologi dan *data science*, peringkat Indonesia naik 39 level dari periode sebelumnya,” ujar Menteri Johnny.

Atas pencapaian dan prestasi tersebut, Menkominfo menegaskan kembali komitmen Kementerian Kominfo dalam mendorong pengembangan SDM bidang digital nasional atau talenta digital nasional di level kecakapan digital tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat lanjut.

“Sebagaimana yang saat ini sedang dan akan terus dilakukan. Lebih lanjut, dapat saya sampaikan bahwa Kementerian Kominfo akan terus mendorong lahirnya lebih banyak lagi talenta digital nasional yang mahir di bidang *data science*, melalui inisiatif 50.000 *Data Science Training*,” jelasnya.

Menurut Menteri Johnny, inisiatif tersebut bertujuan untuk memfasilitasi pelatihan *data science* kepada 50 ribu peserta setiap tahunnya.

“Pelatihan multidisiplin teknis yang meliputi kemampuan statistik, *data analysis*, dan *machine learning* di berbagai tingkatan keahlian,” ujarnya.

Guna menyukseskan program 50 Ribu *Data Science Training* dan melahirkan lebih banyak talenta digital nasional, pelatihan yang dilakukan bekerja sama dengan berbagai perusahaan teknologi global dan nasional.

“Seluruh upaya ini merupakan langkah komprehensif dalam mendorong pengembangan talenta digital nasional, demi mewujudkan Indonesia sebagai bangsa digital yang maju dan berdaya saing global,” tandas Menkominfo.

Dalam konferensi pers, Menkominfo didampingi Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Samuel Abriyani Pangerapan dan Staf Khusus Menteri Kominfo Bidang Kebijakan Digital dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dedy Permadi.





Menkominfo Dorong Pemanfaatan TIK dengan Komponen Lokal

Pemerintah mendorong pembangunan pusat data di Indonesia oleh sektor privat dengan menggunakan komponen lokal dalam negeri. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menegaskan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan komponen lokal bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak.

“Pemerintah menekankan betul-betul untuk menaruh komponen Indonesia. Setidaknya dengan adanya komponen Indonesia ini akan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak,” tandasnya dalam sesi tanya jawab dengan pekerja media usai melakukan Factory Tour di Pabrik PT. Schneider Electric Manufacturing, Batam, Kepulauan Riau, Jumat (24/06/2022).

Menkominfo menyatakan Pemerintah mendukung penuh kebijakan manajemen suatu perusahaan yang menyerap tenaga kerja Indonesia.

“Pemanfaatan dan penggunaan talenta lokal menjadi perhatian serius bagi Pemerintah dan saya lihat tadi di sini *transfer knowledge* itu bukan sekadar teori, namun turut dipraktikkan secara langsung. Saya kira menjadi bagian dari keadilan dunia, jangan sampai kita dieksploitasi, tetapi kita mendapat *benefit* yang perlu kita dukung sebagai suatu langkah maju,” jelasnya.

Sejalan dengan peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri serta Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GNBBI) pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, menurut Menteri Johnny, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022.

“Direktif Bapak Presiden Joko Widodo dalam inpres itu, Pemerintah berpihak kepada produk di

dalam negeri dan ini kegiatan afirmatif, didorong, didukung untuk kita laksanakan. Pemerintah setiap tahun mengalokasikan Rp1.400 Triliun belanjanya, Rp1.000 Triliun untuk pemerintah sendiri sedangkan untuk BUMN-nya sebesar Rp 400 triliun yang bisa digunakan terhadap belanja sektor-sektor di dalam negeri," tuturnya.

Menkominfo menilai, alokasi anggaran belanja dalam negeri akan menjadi besar jika ditambah dengan aktivitas yang didukung oleh sektor privat. "Jadi itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Apalagi di sektor-sektor yang sudah *sophisticated* teknologinya sehingga dalam rangka mendorong pembangunan infrastruktur digital hulu dan hilir, kita butuh peralatan teknologi," tuturnya.

Teknologi 5G

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Johnny menjelaskan kebijakan Pemerintah dalam mendukung pemanfaatan 5G. Menurutnya, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kementerian Kominfo sedang menyiapkan *farming* dan *refarming* spektrum frekuensi radio.

"Hal itu dilakukan agar teknologi bisa lebih *advance* dan lebih maju. Tadi saya lihat di sini tidak saja hanya sebagai *manufacturing*, tetapi juga memanfaatkan 5G *network experience* bersama-sama Telkomsel. Nah, 5G yang dipakai di sini itu 5G *experience* agar pemanfaatan 5G nantinya lebih *advance* dan lebih maju bisa kita gunakan," jelasnya.

Menurut Menkominfo, selain jaringan telekomunikasi 4G sebagai tulang punggung teknologi telekomunikasi Indonesia, saat ini Pemerintah sudah mengenalkan pemanfaatan jaringan telekomunikasi 5G. Menurut Menteri Johnny, pemanfaatan spektrum frekuensi di jaringan *microwave* juga diperlukan untuk pengembangan teknologi *autonomous*.

"Pabrik ini kan bisa bekerja sama tanpa lampu, akan lebih efisien lagi karena tadi dibilangnya bergerak ke *green solution*. Suatu saat nanti, dengan memanfaatkan spektrum frekuensi untuk pengembangan teknologi *autonomous*. Ini yang

akan kita dorong, tentu 5G tidak bisa dipakai semua tempat, tetapi untuk *showcase*-nya kita mendorong Smart City, Smart Village, Smart Practice, Smart Airport, Smart Harbor, semua yang bisa memanfaatkan 5G dan teknologi Internet of Things," tuturnya.

Menkominfo menyatakan Indonesia juga membutuhkan kolaborasi dengan sektor privat dalam hal mengembangkan Smart Sensor untuk memastikan agar tingkat keselamatan bekerja bagi pegawai terjaga dengan baik.

"Ini kaitannya dengan pemanfaatan IoT, sehingga orang enggak perlu lagi datang ke sini (Batam) dengan menggunakan pesawat, nggak perlu lagi ke restoran karena bisa diselesaikan sendiri," ujarnya.

Di sektor yang lain, Menteri Johnny mendorong perusahaan privat mengembangkan efisiensi dengan memanfaatkan teknologi seperti *Virtual Reality*, *Augmented Reality*, dan *Metaverse*.

"Menjadi dunia yang bukan baru lagi, bukan pilihan lagi. Kita semuanya berangkat ke sana, tidak saja teknologi dari sisi *user* (pengguna), tetapi dari sisi teknologi *producer* untuk menyiapkan ruang teknologi," ungkapnya.

Dalam kunjungan ke PT. Schneider Electric Manufacturing, Menkominfo Johnny G. Plate didampingi Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Samuel A. Pangerapan; Sesditjen Aptika Slamet Santoso; dan Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah, Bambang Dwi Anggono. Selama kunjungan, Menkominfo juga didampingi Plant Director PEL, Kodrat Sutardi; Plant Director PEM and Sensor, Ery Arifiani; HR Director, East Asia Japan Products Cluster - Global Supply Chain, Susi Yulianti; Business VP Data Center, Yana Achmad Haikal; East Indonesia and Timor Leste Regional Sales Head, Mega Hermala; serta Digital Transformation Leader, Budi Sulistiarto.



Jaga Soliditas Nasional, Menkominfo Dorong Pers Sajikan Informasi Akurat

Konsolidasi dan kegotongroyongan antarpihak menjadi penting di tengah kontestasi demokrasi akan berlangsung. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate secara khusus mendorong pers bisa mentransmisikan berita dan informasi yang mampu menjaga soliditas nasional. Menurutnya hal itu ditujukan agar kontestasi dan sirkulasi demokrasi berjalan dengan baik.

“Sehingga memungkinkan *output* kontestasi demokrasi itu menghasilkan para pemimpin secara hirarkis. Berjenjang. Daerah dan pusat, pemimpin nasional dan kepala pemerintahan sekaligus negara yang berkualitas sesuai tantangan dan kebutuhan zaman 2024-2029. Kita butuh butuh konsolidasi dan kegotong-royongan memperjumpakan titik-titik kekuatan-kekuatan yang terdistribusi bisa bersimpul menjadi sesuatu kekuatan yang dahsyat,” ujarnya dalam Seminar Kebangsaan: Pers, Partai Politik, dan Pemilu, di Jakarta Selatan, Kamis (16/06/2022) malam.

Menkominfo mengakui pers dan penyiaran yang menjadi pilar demokrasi memiliki peran penting. Menurutnya kerja pers bukan hal yang mudah karena ada harapan untuk menjadi *safe guard*.

“Bukan pekerjaan yang gampang, di situasi seperti ini perlu tajam, cekatan, untuk bisa *safe guard*. Kita mempunyai pedang yang bisa dua matanya. Di samping tentu lembaga-lembaga negara lainnya yakni eksekutif, legislatif, yudikatif, dan kuasi pemerintah lainnya,” ungkapnya.

Menteri Johnny mengharapkan situasi kontestasi demokrasi di Indonesia tetap terkendali dengan baik. Selama ini proses itu dapat berlangsung dengan aman dan ke depan semua pihak juga mengharapkan akan menjadi pesta yang menggembirakan melalui kontestasi demokrasi yang harmonis.

“Di situlah peran pers dan media penting. Di situlah peran pers dan media dalam seleksi informasi agar yang ditransmisikan pada masyarakat tidak saja akurat dan tepat waktu. Tetapi juga berdampak bagi kehidupan bersama kita sebagai Indonesia yang satu,” tandasnya.

Di era disrupsi saat ini, Menkominfo menegaskan Indonesia perlu meletakkan dan menempatkan pers di tempat yang tepat. Hal itu diperlukan

agar menjadi penyalur dan transmitter informasi yang akurat kepada masyarakat. Menurut Menteri Johnny, pers juga mempunyai sisi koin yang lain untuk menjaga *sustainability* pers sebagai industri.

"Pers tidak saja berada pada sisi koin transmisi informasi, tetapi juga sebagai manifestasi ekspresi demokrasi dan saluran atau kebebasan berpendapat dan berserikat. Di sisi yang lain, harus menjadi industri yang bisa bertumbuh sehat," ujarnya.

Menurut Menkominfo saat ini media konvensional tengah menghadapi tantangan besar. Terutama berkaitan dengan konvergensi dan *level playing field* yang sama.

"Kita tahu sama-sama itu, kita telah berdiskusi lama tentang itu. Perlu kita jaga antara konvensional dengan *the new commerce*/atau *the new media*. Kita semua tahu itu, tetapi bagaimana memungkinkan satu arena yang baik bagi media agar pers sebagai industri sehat dalam misinya sebagai pilar demokrasi bisa berfungsi dengan baik," tandasnya.

Oleh karena itu, beberapa waktu yang lalu Pemerintah bersama dengan industri media bersama-sama telah mengambil inisiatif untuk menyiapkan satu regulasi yang memungkinkan konvergensi.

"Saat ini sedang kita proses bersama, yang kita sebut dengan *publisher right*. Dokumen itu sedang dalam penyusunan dan tahapan. Namun demikian, sebagai *benchmark*, Presiden Uni Eropa, Ursula Von Der Leyen, baru saja menyampaikan beberapa waktu yang lalu European Union telah mengundang-undangan *Digital Market Act* dan *Digital Service Act* yang juga bisa menjadi *benchmark* bagi Indonesia dalam menyusun *publisher rights*," jelas Menteri Johnny.

Menurut Menkominfo *Digital Service Act* membuka ruang industri bisa bertumbuh dengan adil, berkembang dengan baik dan menciptakan iklim persaingan usaha yang seimbang.

"Platform-platform digital menjadi *gate keeper* yang bisa menjaga konvergensi. Hingga saat ini Uni Eropa merasa platform digital tidak berfungsi sebagai *game keeper* yang baik. Oleh karena itu, dibutuhkan satu regulasi yang mengatur agar

platform-platform digital menjadi *gate keeper* yang *fair for everyone*," tuturnya.

Melalui *Digital Service Act*, Menteri Johnny mengharapkan ruang digital dapat dijaga agar aman, bersih, dapat digunakan dengan baik.

"Juga, dua mata koin. Ini yang barangkali perlu menjadi masukan bagi kita, di satu sisi pers sebagai pilar demokrasi dan di sisi yang lain pers sebagai industri yang *sustainability*-nya harus terjaga dengan baik agar transmisi informasi juga bisa sehat," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Menteri Johnny menegaskan kembali dirinya adalah Menteri Komunikasi dan Informatika bukan Menteri Penerangan. Meskipun di Kementerian Kominfo ada Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, namun lebih menjalankan fungsi komunikasi publik.

"Ini biar tidak salah persepsi, banyak orang salah menyebut sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi. Perlu saya tegaskan saya ini bukan Menteri Penerangan. Di Kementerian Kominfo yang saya pimpin, ada Direktur Jenderal IKP yang bertugas melaksanakan komunikasi publik. Tetapi saya adalah Menteri Komunikasi dan Informatika atau biasa disebut dalam Bahasa Inggris sebagai ICT Minister atau bahkan lebih spesifik dengan sebutan Menteri Digital," tegasnya.

Menkominfo mengajak semua pihak untuk menjadi bagian dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia di bidang digital. Hal itu dilakukan agar ruang digital dapat diisi dengan hal yang bermanfaat.

"Marilah bersama-sama kita perangi hoaks, misinformasi, disinformasi, malinformasi. Akhiri semburan-semburan dusta agar ruang digital kita bersih, agar kita hadapi dan nikmati pesta demokrasi dan pembangunan digital ekonomi yang potensial ini demi untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia," ajaknya.

Dalam seminar kebangsaan itu, hadir Menteri Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya Bakar; Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo; Menteri Perdagangan periode Juli 2016-Oktober 2019, Enggartiasto Lukita; serta tokoh-tokoh prominen industri media.



Kembangkan Ekosistem Startup, Menkominfo: Pemerintah Sediakan Stimulus Pelatihan Digital

Pemerintah mendorong pengembangan ekosistem startup digital untuk memanfaatkan ekonomi digital dengan optimal. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan Pemerintah menyiapkan stimulus pelatihan untuk menciptakan talenta digital untuk kebutuhan startup digital.

“Kehadiran Pemerintah penting karena bisnis ini masih tergolong baru di Indonesia. Tapi *dependency* kita terhadap bisnis ini tinggi, sehingga kita tidak punya pilihan selain membangun bisnis ini. Kami menyiapkan pelatihan untuk talenta digital dalam jumlah yang banyak untuk bisnis ini tumbuh dan berkembang,” ungkapnya dalam Dialog Economic Challenges Metro TV: Gelembung Startup Pecah? dari Jakarta Barat, Selasa (14/06/2022) malam.

Menkominfo mengharapkan keberadaan talenta digital akan memicu ide untuk melahirkan startup digital di Indonesia. “Begitu kita membentuk

talent-nya, maka kita membentuk ide dan gagasan. Setelah ide dan gagasan dibentuk, di situ awalnya startup digital. Di sinilah Pemerintah perlu hadir melalui pelatihan-pelatihan,” tegasnya.

Mengenai stimulus pelatihan yang disiapkan, Menteri Johnny merinci ada banyak pelatihan untuk pengembangan startup digital yang disediakan Kementerian Kominfo maupun Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

“Khususnya yang teknologi nondigital itu ada di Kemendikbudristek, tentu ada startup juga. Kominfo sendiri punya beberapa jenis pelatihan. Sekolah Beta misalnya, merupakan program yang memberikan pengetahuan dan keahlian mendasar dalam dunia startup yang berisikan serangkaian kelas pembekalan pengetahuan dasar terkait konsep *startup* teknologi dan model bisnis untuk para pemula industri startup,” jelasnya.

Kementerian Kominfo juga menyiapkan program Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital yang bertujuan mencari serta mengkurasi ide kreatif dan tim dalam pembuatan produk inovatif. Lewat program itu, Kementerian Kominfo memberikan pendampingan bagi calon pendiri startup yang akan memulai bisnis.

“Mendampingi pelaku *startup* yang berada pada tataran mencari solusi, validasi solusi, hingga mendapatkan konsumen pertama. Setelah startup digital itu berkembang, ide-ide kreatifnya mulai dikurasi, masuklah di program 1.000 Startup Digital,” tutur Menkominfo.

Menurut Menteri Johnny, Kementerian Kominfo juga mendampingi pengembangan startup digital lewat program *startupstudio.id*. Program itu menyasar startup yang telah berkembang hingga C-Level atau *founder*, guna menyiapkan wawasan dan kemampuan teknis secara lebih intensif.

“Kemudian, setelah bertumbuh dan berkembang dengan benar, di-*matchmaking* dengan capital venture melalui program HUB.ID. Hal itu dilakukan agar startup digital mendapatkan komitmen investasi, untuk membantu peningkatan kemampuan startup digital memperluas layanan ke masyarakat. Itu *very early bargaining*, setelah itu startup digital bertumbuh,” jelasnya.

Menkominfo mengakui ada banyak tantangan yang dihadapi pelaku *startup* digital, salah satunya berkaitan dengan manajemen, pembiayaan dan pengelolaan teknologi.

“Pada saat *startup* digital mulai bertumbuh, gagasan dan ide-ide kreatif tidak akan pernah berhenti. Begitu pula dengan teknologinya. Hal itu menandakan *Capital Expenditure*-nya berjalan dan terus berkembang karena sejalan dengan kebutuhan. Itulah tantangannya! Setelah startup digital mulai berkembang, dibuat valuasi karena butuh pembiayaan dan seterusnya,” ungkapnya.

Saat ini, menurut Menteri Johnny, tantangan pelaku startup digital tidak hanya dari dalam saja, namun juga dari luar antara lain kondisi pandemi COVID-19, disrupsi teknologi, dan geostrategis. Oleh karena itu, stabilitas dan kelangsungan bisnis startup digital perlu mendapatkan perhatian.

“Pasti ada dampaknya geostrategis di sektor pangan dan energi. Setelah itu *financial*, selanjutnya *startup* akan berhadapan dengan Capital Venture dan sebagainya. Kemudian ke makro ekonomi, di situlah kita perlu stabilitas,” tandasnya.

Dalam dialog itu hadir Sekjen Amvesindo, Eddi Danusaputro; *Head of Public Policy and External Communications* Indonesia Digital Association, Rama Mamuaya; dan pakar bisnis, Yuswohady.





Penuhi Kebutuhan SFR, Menteri Johnny: Kominfo Terapkan Refarming dan Bauran Pembiayaan

Saat ini, Indonesia masih mengalami keterbatasan spektrum frekuensi radio (SFR) di semua level. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika terus melakukan *farming* dan *refarming* SFR guna memenuhi kebutuhan *fixed broadband* maupun *mobile broadband*.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan kebutuhan spektrum frekuensi radio sampai tahun 2024 setidaknya 2.047 MHz di semua level. Namun, di akhir tahun 2019 baru tersedia sekitar 737 MHz.

“Berarti ada kekurangan spektrum sebesar 1.310 MHz yang harus dipenuhi dalam periode tahun 2020-2024. Itu bukan pekerjaan yang gampang. Ibaratnya kalau tanah, *landbank* harus membebaskan lahan, nah ini harus membebaskan

spektrum,” tuturnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI tentang Rencana Kerja Anggaran dan Rencana Kerja Pemerintah-Kementerian Kominfo Tahun Anggaran 2023 serta Isu-isu Aktual Bidang Kominfo, di DPR RI Jakarta Pusat, Rabu (08/06/2022).

Menkominfo menjelaskan spektrum frekuensi radio di Indonesia sedang digunakan oleh berbagai peruntukan pemanfaatan. “Termasuk pemanfaatan untuk satelit telekomunikasi dan itu besar sekali *bandwidth*-nya. Yang harus kita lakukan pembicaraan apakah menunggu sampai akhir masa layanan satelit atau melakukan pemindahan satelit ke spektrum yang lain,” jelasnya.

Menteri Johnny menjelaskan penetrasi *fixed broadband* saat ini masih terbatas karena



bergantung pada ketersediaan spektrum frekuensi radio. Ke depan, secara bertahap, keterbatasan itu akan diatasi dengan penyediaan layanan *mobile broadband*.

“Saat ini memang spektrum frekuensi digunakan utamanya untuk *mobile broadband*, tentu pada saatnya nanti secara bertahap akan dilakukan juga untuk memberikan dukungan terhadap layanan *fixed broadband*. Masalah yang kompleks tersebut akan terus dicarikan jalan solusi,” ujarnya.

Menurut Menkominfo, salah satu kendala penyediaan spektrum frekuensi radio untuk *fixed broadband* berkaitan dengan defisit atau kekurangan anggaran. Oleh karena itu, Menkominfo mengajak seluruh pihak terkait secara bersama-sama lebih kreatif untuk melakukan upaya *blended financing* atau bauran pembiayaan.

“Dan sedapat mungkin dependensi terhadap APBN dari waktu ke waktu kita kurangi. Karena menyadari tekanan fiskal besar, tapi kebutuhan fiskal juga besar. Sehingga prioritas-prioritas itu harus betul-betul dilakukan skala yang tepat. Dengan cara apa? termasuk dengan cara pemanfaatan bauran pembiayaan,” ungkapnya.

Menteri Johnny menyontohkan bauran pembiayaan seperti mengajak dan mengikutsertakan proyek *Public Private Partnership* atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). “Dan

itu sedang giat-giatnya kami lakukan, karena pembiayaan untuk kebutuhan telekomunikasi dan konektivitas yang menjadi agenda Indonesia dan agenda dunia. Tidak murah, sangat mahal sehingga usaha ini kita lakukan,” tandasnya.

Bauran pembiayaan lain juga terus dilakukan seperti upaya mencari pembiayaan bilateral dalam rangka untuk menghemat pemanfaatan dan penggunaan APBN rupiah murni.

“Jadi ada banyak bauran-bauran pembiayaan. Untuk BAKTI Kominfo sendiri melalui *Universal Service Obligation* (USO). USO ini tidak bisa kita tingkatkan, saat ini 0,25% dari *revenue operator* yang juga berlaku di banyak negara di dunia,” tutur Menkominfo.

Dalam pertemuan di Internasional Telecommunication Union (ITU), Menteri Johnny pernah menyampaikan kemungkinan untuk meningkatkan persentase USO. Namun, hampir semua Menteri Keuangan mengkhawatirkan jika hal itu dilakukan.

“Sehingga di Indonesia sudah cukup maksimal dan maksimum sebesar 0,25% USO dari *revenue*. Besar nominalnya sangat tergantung kepada *revenue operator* seluler kita, yang kalau dilihat dari proyeksi penerimaannya relatif flat, dia bertambah tapi tidak banyak. Antara Rp0,75 Triliun sampai Rp3,5 Triliun setiap tahunnya. Sedangkan kebutuhannya kita sangat besar, sehingga kreativitas *blended financing* itu pekerjaan rumah tersendiri yang membutuhkan dukungan politik yang kuat dari Komisi I DPR RI,” tandasnya.

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI, Menkominfo Johnny G. Plate didampingi seluruh pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian Kominfo. Selain itu, hadir Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, Agung Suprio; Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yogieantoro; dan Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra.



Jadi Agenda DEWG G20, Sekjen Kominfo: Revitalisasi Pariwisata Lewat Transformasi Digital

Jakarta Pusat, Kominfo - Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor paling terdampak pandemi COVID-19 di Indonesia. Sepanjang tahun 2020, jumlah wisatawan mancanegara hanya 25% dari tahun sebelumnya. Bahkan, sekitar 409.000 tenaga kerja sektor pariwisata kehilangan pekerjaan dan pendapatan negara mengalami penurunan Rp20,7 Miliar.

Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Mira Tayyiba mengatakan Pemerintah tengah melaksanakan program strategis untuk pemulihan sektor pariwisata di tanah air. "UMKM Go online, Bangga Buatan Indonesia, Membangun Jaringan 4G di 12.548 desa dari 83.218 desa/kelurahan yang belum terjangkau jaringan 4G, JPHUB, Pembangunan Desa Wisata," ujarnya dalam acara Road to DTE: Revitalisasi Sektor Pariwisata Melalui Digitalisasi yang berlangsung secara virtual dari Jakarta Pusat, Selasa (14/06/2022).

Migrasi IPv4 ke IPv6, Kominfo Libatkan Stakeholders

Yogyakarta, Kominfo - Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah mendorong implementasi migrasi Internet Protocol version 4 (IPv4) ke Internet Protocol version 6 (IPv6). Direktur Telekomunikasi Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Aju Widyasari mengatakan hal itu ditujukan agar mampu meningkatkan performa akses layanan internet di tanah air sesuai kebutuhan terkini.

"Kami sedang terus mendorong mengenai IPv4 dan IPv6 dalam kaitannya dengan penggunaan IP. Karena kita sudah sadari bahwa *address* untuk IP versi 4 itu sangat terbatas, sementara penggunaan *traffic internet* oleh semua negara sebetulnya, tidak hanya Indonesia itu terus tumbuh. Tentunya kita harus menyiapkan kebutuhan IP *address* yang lebih sesuai dengan kebutuhan saat ini," jelasnya usai Webinar "5G dan IoT, Lebih baik IPv4 Atau IPv6?" yang berlangsung hibrida dari Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, Kamis (09/06/2022).



Lumajang Siap Pindah ke Siaran TV Digital

Surabaya, Kominfo - Pemerintah mendorong transformasi TV Analog ke TV Digital. Pemerintah ingin mengalihkan ke televisi digital agar pemanfaatan frekuensi dapat lebih efisien. Hal tersebut disampaikan oleh Staf Khusus Kemenkominfo, Rosarita Niken Widiastuti saat memberikan Sosialisasi tentang Analog Switch Off (ASO), bertempat di Hall Hotel GM Lumajang, Minggu (12/06/2022).

Niken juga menyampaikan, bahwa saat ini Kementerian Kominfo bersama DPR RI aktif untuk melakukan Sosialisasi *Analog Switch Off* (ASO) untuk menyebarluaskan informasi dan memberi pemahaman kepada masyarakat terkait siaran TV analog ke siaran digital. Mulai 25 Agustus 2022, siaran TV analog di Lumajang akan dihentikan dan dipindah ke siaran TV digital. Sedangkan, saluran sinyal TV analog akan dimatikan total oleh pemerintah mulai 2 November 2022 nanti.



The 4th IoT Creation, Dicari Solusi Digital Pertanian Peternakan dan Perikanan

Surabaya (SDPPI) – Melalui ajang The 4th IoT Creation, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), mengajak para pegiat di bidang Internet of Things menemukan solusi meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, peternakan dan perikanan.

“Teknologi IoT dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan mengurangi cost,” kata Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika Mulyadi, Rabu (22/6/2022).

IoT Creation tahun ini mengangkat tema besar *Recover Stronger, Collaboration Beyond Borders*. Secara khusus, dalam rangkaian kegiatan di Surabaya, Ditjen SDPPI bersama Asosiasi Internet of Things Indonesia (Asioti) menggelar Seminar *Forecast Agriculture, Farm, and Fisheries Business with IoT*.

Gelar Bimtek, Klungkung Bergerak Menuju *Smart City*

Jakarta, Ditjen Aptika – Guna mewujudkan kota pintar (*smart city*) berbasis teknologi informasi, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo), bersama dengan pemerintah kabupaten Klungkung, Bali menggelar bimbingan teknik (Bimtek) di Aula Praja Mandala, kantor Pemkab Klungkung pada Kamis (23/6). Bimtek dibuka oleh Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta.

Dalam sambutannya, Suwirta berharap bimtek ini bisa menjadi sebuah langkah bagi kabupaten Klungkung untuk bergerak menuju terwujudnya *smart city*. “Saya berharap bimtek yang kita gelar hari ini bisa menjadi sebuah langkah nyata bagi Klungkung untuk mewujudkan harapan menjadi kota yang cerdas dalam melayani masyarakat, meningkatkan potensi daerah, dan memecahkan tiap masalah yang dihadapi,” ujarnya.

Kemkominfo menetapkan Kabupaten Klungkung sebagai satu dari 50 kabupaten/kota yang masuk dalam program Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) di tahun 2022.



Informasi Senjata Utama Santri di Era Digital

Lombok Timur (SDPPI) – Di era digital sekarang ini, informasi menjadi senjata utama bagi santri sebagai generasi milenial untuk berkembang dan berwawasan lebih pada suatu hal yang baru. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Ismail menilai santri di Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki tingkat kecerdasan yang tidak kalah unggul dari daerah lain. Hanya saja, informasi masih menjadi hambatan.

“Untuk bersaing di era transformasi digital, informasi menjadi hal yang penting, karena informasi menjadi sumber utama bagi santri untuk menambah ilmu dalam membuat usaha dan lain sebagainya,” ucap Dirjen SDPPI pada *press conference* Kuliah Umum di Pondok Pesantren Syaikh Zainuddin NW Anjani, Lombok Timur, Kamis (16/6/2022).

Informasi sangat diperlukan agar bisa ikut berkontribusi dan memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan diri. Dirjen SDPPI merasa yakin Pondok Pesantren merupakan menjadi salah satu pusat pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan-lulusan hebat. “Kontribusi yang dimiliki oleh santri sangat besar dan sangat berarti bagi bangsa dan negara,” ucapnya.

Smart Farming untuk Tingkatkan Produktivitas Petani Sumba Timur

Sumba Timur, Ditjen Aptika – Ditjen Aplikasi Informatika mendorong petani di Kabupaten Sumba Timur mengadopsi *smart farming* terpadu berbasis pertanian presisi. Hasil panen bisa meningkat hingga 2-5 ton per hektar melalui alat pertanian pintar. “Dengan teknologi ini diharapkan bisa menekan biaya produksi dan meningkatkan pendapatan petani,” kata Ketua Tim Transformasi Digital Pertanian Maritim Logistik (PML) Kementerian Kominfo, Wijayanto saat Sosialisasi Petani Digital 4.0 di Kabupaten Sumba Timur, Kamis (23/06/2022).

Dengan penggunaan *Internet of Things* (IoT) petani bisa menekan pemakaian pupuk hingga 70% tergantung jenis komoditas dan kondisi lahan. Selain itu, petani juga dapat mengetahui keadaan cuaca sehingga pemupukan menjadi optimal.



Walikota dan Anak 11 Tahun Semangat Dapatkan IAR Siaga

Bontang (SDPPI) - Walikota Bontang Basri Rase ikut Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) yang diselenggarakan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Samarinda di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Ia tercatat sebagai peserta di Tingkat Siaga bersama anak berusia 11 tahun, seorang tunanetra dan 90-an peserta lainnya.

Walikota menyampaikan apresiasinya. “Harus bangga menjadi penggiat amatir radio, terutama menjadi anggota ORARI, karena selain untuk wadah bersosialisasi, juga turut berperan dalam hal memberikan informasi ketika ada musibah banjir maupun kebakaran yang rawan terjadi di Kota Bontang,” ujarnya ketika memberi sambutannya, Minggu (26/6/2022).

Balmon Pontianak Optimalkan Sosialisasi Izin Kelas

Pontianak (SDPPI) – Masyarakat di era digital perlu memahami pentingnya menggunakan perangkat telekomunikasi yang memenuhi ketentuan teknis atau sudah bersertifikasi. Bila perangkat yang memanfaatkan spektrum frekuensi radio, atau *Broadband Wireless Access (BWA)* tidak tersertifikasi, berpotensi menimbulkan gangguan keamanan.

“Penggunaan frekuensi radio yang tidak sesuai peruntukannya, pada perangkat BWA khususnya, dapat menimbulkan kerugian besar, terutama dalam hal keselamatan,” kata Kepala Balai Monitor SFR Kelas II Pontianak Bobby Satriyo, saat membuka Sosialisasi “Bersama Wujudkan Tertib Pemanfaatan Frekuensi Radio *Broadband Wireless Access (BWA)* Berdasarkan Izin Kelas dan Pentingnya Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi dalam Mendukung Era Digitalisasi bagi Masyarakat Kalimantan Barat”, Kamis (23/6/2022)

Kominfo Ajak ASN Bengkulu Tingkatkan Literasi Digital Masyarakat Desa

Bengkulu, Ditjen Aptika – Kementerian Kominfo melalui Ditjen Aptika mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bengkulu untuk meningkatkan literasi digital masyarakat di pedesaan. Caranya melalui penyuluhan, pelatihan dan pendampingan.

“Kami berharap Bengkulu dapat memiliki trainer dari Penggerak Swadaya Masyarakat untuk melakukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan digital ASN dalam menunjang tugas dan fungsinya, serta masyarakat desa agar dapat beradaptasi memasuki era digital,” kata Ketua Tim Ketua Literasi Digital Sektor Pendidikan, Niki Maradona pada kegiatan Pelatihan Literasi Digital Sektor Pemerintahan kepada Penggerak Swadaya Masyarakat di Bengkulu, Selasa (14/6/2022). Literasi digital dapat dilakukan dalam bentuk penyuluhan, pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat desa. Hal tersebut juga dapat membantu tugas Kominfo sebagai pelaksana kegiatan literasi digital di daerah.

Hub.Id Accelerator 2022 Cari 25 Startup Terbaik, Beri Pendampingan Akses Pendanaan dan Kerja Sama Bisnis



Jakarta, Ditjen Aptika – Ditjen Aplikasi Informatika melalui Direktorat Ekonomi Digital kembali menggelar Hub.Id Accelerator 2022 untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis startup digital. Program tersebut mencari 25 startup terbaik untuk diberi pendampingan dalam memperoleh akses pendanaan dan kerja sama bisnis.

“Kita mencari 25 *startup* terbaik di lima sektor vertikal, yakni *financial services, logistic supply chain, SME Enabler, B2B enterprise solution, dan agriculture and aquaculture*,” kata Ketua Tim Business Matchmaking Ditjen Aptika, Luat Sihombing saat Presscon Hub.Id Accelerator 2022 di Jakarta, Senin (13/06/2022). Hub.Id Accelerator akan melakukan serangkaian kegiatan, berawal dari *business mentoring* hingga *global immersion*, yang berlangsung hingga Oktober 2022 mendatang.



Kamu Ikuti, Kamu Terinformasi

Ikuti Sosial Media Kominfo

-  @Kemenkominfo
-  @kemkominfo
-  Kemkominfo
-  Kemkominfo TV
-  @kemkominfo

Program Menarik Kominfo

- Miss Lambe Hoaks VS Fact Boy
- TokTok Kominfo
- Kominfopedia
- Netizen Bertanya Kominfo Menjawab
- Kominfo News

Retweet | Share | Like | Follow | Subscribe | Love | Comment

Waspada *Data Breach*

Data breach adalah insiden keamanan dimana data pengguna *device* atau aplikasi telah diakses tanpa izin, biasanya data ini diperjualbelikan oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

Cara Mencegah *Data Breach*

- ▶ Buatlah *password* yang unik dan kuat
- ▶ *Update Security software* secara berkala
- ▶ Enkripsi dan *backup* data secara rutin
- ▶ Aktifkan verifikasi dua langkah
- ▶ Buat batasan akses ke data penting
- ▶ Matikan sinkronisasi antar akun

